

Partai Politik Sebagai Kekuatan Sosial Politik

Dr. Isbrodroni Suyanto, M.A.



PENDAHULUAN

Modul ini akan membahas 3 hal, yaitu *pertama*, pentingnya partai politik di negara modern demokratis dan berbagai definisi partai politik sebagai landasan konseptual tentang partai politik. *Kedua*, mengemukakan “partai-partai politik” sebelum kemerdekaan dan *ketiga* membahas tentang partai-partai politik sesudah kemerdekaan yang akan dibagi pada masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru dan masa reformasi. Modul ini akan menjelaskan bagaimana interaksi partai-partai politik dengan kekuasaan.

Di masa kolonial, gerakan berbagai organisasi sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai partai politik. Mereka lebih bersifat sebagai kelompok-kelompok kepentingan yang masih mengatas namakan etnis dan agama masing-masing. Gerakan mereka masih bersifat kooperatif dengan pemerintahan kolonial. Setelah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, bermunculanlah berbagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan bersama yaitu kepentingan bangsa Indonesia. Di masa pendudukan Jepang, partai politik diwadahi dalam tiga organisasi, yaitu putera (pusat tenaga rakyat) yang mewadahi aspirasi yang berorientasi non-agama Islam, Masyumi yaitu partai yang mewadahi aspirasi Islam dan Fujinkai yang mewadahi aspirasi gerakan kaum perempuan. Menjelang kekalahannya, semua organisasi tersebut dibubarkan oleh Jepang.

Sesudah kemerdekaan melalui Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 3 November 1945, mendorong pembentukan partai-partai sebagai bagian dari demokrasi, akibatnya lahirlah hampir 150 partai politik. Faktanya, sejak kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai dalam setiap sistem politiknya, yaitu sistem politik parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru dan reformasi. Akan tetapi, di masing-masing sistem tersebut, menganut multipartai sistem yang berbeda-beda. Pada masa parlementer, multipartai yang murni. Sesudah pemilu 1955, partai yang lolos

dari pemilu tersebut ada 26 partai politik. Masa demokrasi terpimpin, partai dikurangi menjadi 10 partai politik. Di masa orde baru, partai politik menjadi 9 (sembilan) dan Golkar. Sesudah dilakukan fusi partai pada tahun 1973, partai politik tinggal 2 (dua) dan Golkar. Sesudah masa Orde Baru, di masa reformasi dan demokratisasi, partai politik mempunyai kebebasan untuk tumbuh.

Setelah mempelajari dan memahami modul ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. mengapa partai politik sangat penting di negara demokrasi;
2. meskipun kita masih di bawah pemerintahan kolonial tetapi mengapa masyarakat tetap berusaha menyalurkan aspirasi mereka;
3. mengapa eksistensi partai politik tergantung pada strategi para elit di masing-masing sistem politik;
4. mengapa kita mempunyai beragam corak partai politik;
5. bagaimana perjuangan partai politik dalam memperebutkan kekuasaan;
6. mekanisme pemilihan umum;
7. mengapa sistem kepartaian kita, selalu berubah-ubah.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian dan Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan urat nadi kehidupan negara modern yang demokratis karena partai politik merupakan wadah aspirasi masyarakat. Tujuan utama partai politik adalah meraih kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum. Tanpa partai politik, rakyat sukar untuk menyalurkan kehendaknya karena negara modern pada umumnya berpenduduk jutaan dan mempunyai ruang lingkup geografis yang luas pula. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak ada satupun negara modern, masyarakatnya bersifat homogen tetapi heterogen. Heteroginitas masyarakat dapat bersumber antara lain dari hubungan darah atau kesukuan (*assumed blood ties*), ras (*race*), bahasa (*language*), agama (*religion*), daerah (*region*), dan adat kebiasaan (*custom*). (Clifford Geertz, 1965:110-113) dan juga aliran-aliran ideologis. Partai politik digunakan oleh kelompok-kelompok atas dasar perbedaan tersebut dan aliran-aliran ideologis untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Landasan sosiologis partai politik dapat berdasarkan atas perbedaan tersebut selain juga dapat berlandaskan atas aliran ideologi atau kelas-kelas dalam masyarakat. Di Malaysia, partai-partai politik pada umumnya berdiri di atas garis-garis komunal seperti UMNO (Melayu), MCA (Cina), MIC (India) dan beberapa lainnya. Di Malaysia Timur, banyak partai yang berdasarkan atas etnik Dayak seperti antara lain UNKO di Sabah, SNAP di Serawak. (K.J. Ratnam, 1967:142-175). Di India, partai Hindu, BJP, Alkali Dahl partai etnik Sikh. Partai politik berdasarkan kelas, menurut Marx, adalah partai buruh dan partai borjuis atau pemilik modal. Di Indonesia partai-partai berdasarkan aliran ideologi seperti PDIP, Partai Sosialis Indonesia, Murba, dan PKI. Di samping itu, terdapat partai politik berdasarkan agama Islam seperti Masyumi dan Nahdatul Ulama dan berbagai partai yang berasal dari kedua partai tersebut. Partai Nonislam seperti Partai Katholik, Partai Kristen dan terdapat pula partai-partai yang bersumber dari kedua agama tersebut.

A. TEORI DAN DEFINISI PARTAI POLITIK

Partai politik yang terorganisir lahir pada pertengahan Abad ke-19 di Eropa Barat, sebagai gerakan-gerakan yang ada di luar pemerintahan. Gerakan-gerakan tersebut semakin menguat sejalan dengan berkembangnya hak-hak individu dalam demokrasi untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan politik yang pada waktu itu dikuasai oleh kaum aristokrat atau bangsawan. Di samping itu, hak pilih individu juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan prinsip-prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kegiatan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya, melahirkan partai politik. Partai politik merupakan organisasi penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Melalui partai politik itulah masyarakat melakukan partisipasi politik dalam mengemukakan dukungan ataupun tuntutan pada pemerintah. Sebagaimana dijelaskan di atas, partai politik merupakan organisasi yang tujuan untuk meraih kekuasaan melalui pemilihan umum. Semakin besar hasil yang diperoleh sebuah partai politik melalui pemilihan umum, semakin besar pula kekuasaan sebuah partai politik untuk mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan politik. Dewasa ini terdapat pula negara-negara yang tidak memiliki partai politik, yaitu negara monarki absolut seperti negara-negara Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, dan Brunei di Asia Tenggara. Negara-negara monarki konstitusional membolehkan berkembangnya partai-partai politik. Contohnya di Asia, seperti Jepang, Malaysia, dan Thailand; di Eropa Utara adalah Swedia, Norwegia, Denmark; dan di Eropa Barat, seperti Belanda, Belgia, Spanyol, dan Inggris. Negara-negara tersebut meskipun berbentuk monarki, tetapi sistem pemerintahan mereka adalah demokratis. Banyak negara dengan bentuk republik, tetapi kehidupan partai politik mereka berada dalam tekanan atau pengendalian negara. Contoh adalah negara fasis seperti Jerman di bawah Hitler, Italia di masa Mussolini, komunisme seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan oligarki militer seperti Myanmar. Partai politik di negara-negara nondemokratis tersebut dapat tetap hidup tetapi mereka dikendalikan oleh negara. Hal tersebut dapat terjadi karena di negara-negara nondemokratis, partisipasi politik sangat dibatasi dan dikendalikan oleh negara.

B. DEFINISI PARTAI POLITIK

Negara modern demokratis atau juga disebut sebagai negara bangsa (*nation state*) pada umumnya berpenduduk besar dengan ruang lingkup daerah yang luas pula. Penyaluran aspirasi rakyat yang mendukung ataupun yang menuntut pada pemerintah, dilakukan melalui partisipasi politik dalam wadah partai-partai politik. Pengertian partai politik adalah sebagai berikut,

Political parties are permanent organizations which contest elections, usually because they seek to occupy the decisive positions of authority within the state. Unlike interest groups, which seek merely to influence the government, serious parties aim to secure the levers of power. In Weber's phrase, parties live 'in a house of power'. (Rod Hague & Martin Harrop, 2001:167)

Partai politik, adalah organisasi permanen yang mengikuti persaingan dalam pemilihan umum yang pada umumnya mereka meraih kedudukan sebagai pejabat dalam suatu negara. Berbeda dengan kelompok kepentingan yang hanya bertujuan untuk mempengaruhi, partai politik berusaha untuk meningkatkan kekuasaannya. Weber menamakan partai politik sebagai hidup dalam 'sebuah rumah kekuasaan'.

Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai berikut,

A political party is the articulate organization of society's active political agents: those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group holding divergent views. (Sigmund Neumann, 1963:352)

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Alan Ware mendefinisikan partai politik sebagai,

Parties are institution that bring together people for the purpose of exercising power within the state. (Alan Ware, 2000:2)

Partai adalah organisasi yang menghimpun rakyat dengan tujuan untuk menjalankan kekuasaan dalam negara.

Jelaslah, bahwa partai politik mempunyai tujuan yang utama, yaitu bagaimana meraih kekuasaan yang sebesar-besarnya melalui pemilihan umum dengan tujuan untuk menentukan suatu kebijakan, sedangkan kelompok kepentingan hanya bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Partai politik mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan politik di tempat partai tersebut bergerak. Melalui elit dari partai politik itulah strategi kebijakan politik negara ditentukan. Dalam negara modern demokratis, semua kebijakan ditentukan oleh elit dalam badan legislatif sebagai hasil rekrutmen partai politik. Robert Michels mengatakan bahwa partai politik, adalah

It is organization which gives birth to the domination of the elected over the electors, of the mandataries over the mandators, of the delegates over the delegators. Who says organization says oligarchy. (Robert Michels, 1966:15)

Organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki. (Robert Michels, 1966:15 edisi Indonesia)

Selanjutnya ia mengatakan bahwa,

Large scale organization gives their officers a near monopoly of power.

Organisasi yang besar akan menyebabkan para pemimpinnya memonopoli kekuasaan organisasi. Yang dimaksudkannya adalah partai politik, serikat-serikat buruh, dan organisasi lainnya dengan struktur birokrasinya yang selalu melekat dalam setiap organisasi partai politik. Semakin besar kekuatan sebuah partai politik, semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki oleh elit atau pemimpin dari partai tersebut.

C. FUNGSI-FUNGSI PARTAI POLITIK

Sebagai sebuah organisasi modern dan penting dalam negara demokratis, partai politik mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut diperlukan

karena melalui kegiatan tersebut, partai politik dapat menjelaskan keinginan-keinginan dari berbagai kelompok dengan berbagai aspirasi mereka ke masyarakat. Setiap kegiatan partai politik, pada akhirnya, adalah bertujuan untuk mengejar kekuasaan melalui pemilihan umum. Dalam bagian ini akan dikemukakan fungsi partai politik di negara demokrasi, otoriter, dan di negara-negara berkembang yang sedang berada pada situasi transisi ke arah demokrasi (Miriam Budiardjo, 2008: 406-415)

1. Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi

Adalah sebagai sarana Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, dan Pengatur Konflik (Miriam Budiardjo, 2008: 406-408).

a. Sarana komunikasi politik

Partai melakukan perumusan kepentingan atau *interest articulation*. Di samping perumusan kepentingan terdapat agregasi kepentingan. Tanpa komunikasi politik masyarakat dan pemerintah tidak akan mengerti maksud dan tujuan dari partai politik. Keberhasilan partai politik dengan komunikasi politiknya akan menghasilkan dukungan pada partai tersebut. Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas (Miriam Budiardjo, 2008: 406-408).

b. Sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses di mana budaya politik dibentuk, dipelihara, dan diubah. Sosialisasi politik juga membentuk sikap-sikap politik, menanamkan nilai-nilai politik, dan mengimpartasi kemampuan politik warga negara dan elit (Gabriel Almond & G. Bingham Powell, Jr, 1978: 79). Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup melalui agen-agenya, yaitu keluarga, sekolah, *peer groups* atau lingkungan bermain, tempat kerja, berbagai organisasi, dan partai politik. Perannya dapat dilakukan melalui media massa, ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya. Melalui sosialisasi politik inilah partai dapat membangun citranya untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya. Akan tetapi, di sisi yang negatif, partai juga memakai konstituennya untuk

meraih kekuasaan, tetapi pada umumnya kepentingan konstituen cenderung dilupakan.

c. Sarana rekrutmen politik

Dalam setiap sistem politik, baik yang masih tradisional ataupun yang sudah maju modern, baik yang nondemokratis ataupun yang demokratis, terdapat mekanisme untuk mengisi peran-peran dalam strukturnya. Dalam negara nondemokratis, peran-peran tersebut ditentukan oleh penguasa tanpa melibatkan rakyat. Sebaliknya, dalam negara demokratis, peran-peran tersebut ditentukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, melalui partai-partai politik dalam pemilihan umum yang telah ditentukan di masing-masing negara. Partai melakukan seleksi kepemimpinan, baik di tingkat nasional, regional, ataupun dalam partai politik itu sendiri. Tanpa rekrutmen atau seleksi elit, akan terjadi *political decay* atau pembusukan politik seperti yang terjadi di negara-negara nondemokratis.

d. Sarana pengatur konflik

Konflik merupakan suatu kondisi yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat manapun, terlebih lagi bila masyarakat bersifat plural atau keberagaman (*diversity*) dari segi etnik, ras, agama, bahasa, daerah, adat istiadat seperti yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Begitu pula perbedaan sosial ekonomi ataupun ideologi dapat memicu konflik. Dalam negara demokrasi, keberagaman ataupun pluralitas harus ditolerir (Henry B. Mayo, 2008:117-118; lihat juga Lyman Tower Sargent, 1978: 35). Akan tetapi, di sisi yang lain, perbedaan juga mengandung potensi konflik. Di sinilah peran partai diperlukan untuk mengatasinya. Partai dapat menumbuhkan pengertian pada para anggotanya ataupun masyarakat untuk melakukan konsensus agar konflik tidak melahirkan instabilitas politik. Dengan melakukan berbagai fungsi tersebut, partai politik merupakan organisasi politik yang sangat penting di negara-negara demokratis. Melalui partai politik, warga negara dapat melakukan partisipasi politik untuk menentukan dan mempengaruhi pembuatan kebijakan politik melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

2. Fungsi Partai di Negara Otoriter

Beberapa negara otoriter adalah Uni Soviet (runtuh pada 1991), Republik Rakyat Cina, dan negara-negara komunis di Eropa Timur. Partai

politik di negara-negara tersebut meskipun mempunyai fungsi-fungsi partai politik seperti yang terdapat di negara-negara demokratis, tetapi mereka bergerak dan hidup di dalam genggaman pemerintah. Partai-partai tersebut tidak mempunyai kebebasan dalam menghimpun aspirasi rakyat. Negara-negara tersebut sangat membatasi keberadaan partai. Bahkan di Uni Soviet, partai politik hanya satu saja karena pemerintahan komunisme tidak mengakui keberagaman. Begitu pula di Cina partai politik lain di luar Partai Komunis Cina tidak dapat bergerak. Demikian pula negara-negara komunis di Eropa Timur. Di negara-negara tersebut tidak terdapat persaingan. Rakyat dipaksa untuk memilih partainya rezim.

Semua fungsi partai dilakukan hanya bertujuan untuk mendukung kedudukan rezim. Seperti fungsi komunikasi politik, dipakai untuk memasukkan doktrin-doktrin ideologi komunisme. Arus informasi bersifat *top-down*, dari pemerintah ke rakyat, sedangkan rakyat tak dapat menyalurkan aspirasinya. Fungsi sosialisasi politik, dilakukan dengan ketat melalui agen-agen sosialisasi politik untuk mendoktrin prinsip-prinsip dan ideologi komunis ke semua aspek kehidupan masyarakat. Fungsi rekrutmen politik dilakukan untuk memilih mereka yang setia dan mempunyai loyalitas yang besar terhadap rezim dan ideologi Marxisme dan Leninisme. Khusus di Uni Soviet, ketika rezim komunis jatuh pada 1991 kemudian lahir *Commonwealth of Independent States*, partai-partai bebas bertumbuh.

Jadi, partai di negara komunis sangat berbeda dengan partai di negara demokrasi. Di negara komunis, partai politik di bawah kekuasaan rezim yang memakai partai hanya untuk kepentingan elit yang berkuasa saja. Rezim tidak mengakui keberagaman sehingga partisipasi rakyat ditekan dan tak dapat tersalurkan. Partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah dilarang. Semua kegiatan dan nilai-nilai dalam masyarakat harus berdiri di atas nilai yang sudah ditentukan oleh negara. Jadi, jelaslah bahwa di negara-negara tersebut prinsip kebebasan dan kedaulatan rakyat tidak ditegakkan.

3. Fungsi Partai di Negara-Negara Berkembang

Masyarakat di negara-negara berkembang pada umumnya sangat plural atau heterogen dari segi agama, etnik, ras, bahasa, nilai, geografis, dan sebagainya. Kesetiaan kepada kelompoknya yang dikenal dengan *primordial sentiments* masih sangat kuat (Clifford Geertz, 1965: 105-158). Partai politik di negara-negara tersebut tumbuh atas kesetiaan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, partai menghadapi hal-hal yang rumit. Di samping menghadapi

partai yang masih bersifat primordial, partai juga menghadapi situasi seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, disparitas antara kaya dan miskin sangat tajam. Partai politik dipakai sebagai saluran untuk memperjuangkan keinginan-keinginan masing-masing kelompok.

Persaingan antarkelompok sering berakibat dengan konflik-konflik politik. Itu sebabnya sistem multipartai di negara-negara berkembang, dibatasi atau dikurangi jumlahnya. Contoh di masa demokrasi parlementer, 28 parpol hasil pemilu 1955, dikurangi menjadi 10 parpol oleh Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Masa Orde Baru di bawah Suharto, partai yang berjumlah 9 dan Golkar dalam pemilu 1971, dikurang melalui mekanisme fusi 1973. Parpol yang 9 difusi menjadi 2 parpol, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Tujuan utama adalah untuk menegakkan stabilitas politik.

D. KLASIFIKASI SISTEM KEPARTAIAN

Sistem partai tunggal atau disebut *dominant party system* terdapat di Afrika Selatan (African National Congress), LDP (Liberal Democrats Party) di Jepang yang menguasai perpolitikan Jepang dari 1955–1993; ICP (Indian Congress Party) di India yang berkuasa sejak 1947–1994. Partai-partai tersebut hidup di negara demokratis. Di sini terdapat *fair competition* dalam pemilu. Partai tunggal juga terdapat di negara nondemokratis, yaitu di Cina, Cuba, Uni Soviet, dan beberapa negara Eropa Timur. Di negara-negara tersebut, tidak terdapat *fair competition* karena semua harus menerima partai politik yang dominan tersebut. Negara yang paling berhasil menyingkirkan partai-partai lain, adalah Partai Komunis Uni Soviet. Indonesia pada tahun 1945, pernah mencoba untuk mendirikan partai tunggal sebagai “motor perjuangan”. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlaksana karena hal tersebut dianggap berbau fasis.

Sistem Dwi-Partai merupakan dua partai yang selalu unggul dalam *fair competition* dan partai-partai lainnya tak berdaya menghadapi kedua partai yang selalu unggul tersebut. Menurut Maurice Duverger, partai-partai tersebut berkembang di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Filipina. Perlu diketahui bahwa Selandia mendapat pengaruh dari Inggris dan Filipina adalah bekas jajahan Amerika Serikat. Sistem pemilu di negara-negara tersebut memakai sistem distrik atau *single member constituency* dan bersifat *winner-take-all*. Di samping kedua partai politik tersebut juga terdapat partai politik kecil lainnya, tetapi partai

politik tersebut hampir tidak berpengaruh, tetapi partai-partai kecil tersebut menjadi berarti apabila hasil kemenangan kedua partai politik tersebut sangat kecil selisih kemenangannya. Sebagai contoh di Inggris yang selalu menguasai perpolitikan adalah partai buruh dan partai konservatif. Terdapat pula partai kecil, yaitu partai liberal demokrat. Partai ini menjadi berarti untuk masuk dalam koalisi dengan salah satu partai partai buruh atau partai konservatif.

Sistem multipartai pada umumnya berada di masyarakat yang sangat beragam budaya politiknya, seperti agama, ras, etnik, dan semacam itu. Kelompok yang beragam tersebut menyalurkan *primordial loyalty* atau *primordial sentiment* mereka dalam partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Sistem multipartai ini merupakan refleksi masyarakatnya. Contoh, Indonesia, Malaysia, Negeri Belanda, Australia, Prancis, Swedia, dan di Federasi Rusia terdapat 43 partai politik setelah jatuhnya partai komunis. Sistem ini berpotensi untuk menimbulkan instabilitas politik apabila tidak terdapat partai mayoritas sehingga partai harus membentuk koalisi untuk dapat meraih kekuasaan di pemerintahan. Sering partai koalisi juga mengalami kegagalan karena oposisi yang kuat. Sebagai contoh, Indonesia di masa demokrasi parlementer, pemerintahan koalisi selalu ambruk sehingga Soekarno mengurangi jumlah partai dan Suharto melakukan fusi partai. Partai hanya PPP dan PDI. Pasca Orde Baru Indonesia kembali ke sistem multipartai. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono ke II, karena tidak terdapatnya partai mayoritas, dibentuklah koalisi partai-partai yang mendukung pemerintahan SBY. Sistem multipartai didukung oleh *fair competition* dan biasanya memakai sistem proporsional dalam sistem pemilunya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian Saudara mengenai partai politik.
- 2) Mengapa partai politik diperlukan di negara demokrasi.
- 3) Jelaskan landasan sosiologis dari partai politik.
- 4) Jelaskan klasifikasi partai politik.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Partai politik adalah organisasi yang bekerja untuk meraih kekuasaan.
- 2) Partai Politik adalah wadah dan penyalur aspirasi rakyat.
- 3) Partai dibentuk berdasarkan berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 4) Partai Tunggal, Dwi Partai dan Multi Partai.

**RANGKUMAN**

Negara modern dan demokratis bersifat plural atau heterogen dan mempunyai ruang lingkup teritori yang luas serta berpenduduk jutaan orang. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk merealisasikan prinsip tersebut rakyat memerlukan organisasi politik yaitu partai politik karena partai politik merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat bersumber dari etnis, ras, bahasa, agama, nilai atau adat istiadat, dan ideologi. Itu sebabnya keberadaan berbagai partai politik dalam negara demokrasi harus diberikan kebebasan tumbuh dan berkembang. Definisi partai politik adalah organisasi yang bersaing untuk meraih kekuasaan dan mempengaruhi pembuatan kebijakan politik. Partai politik berusaha meraih dukungan rakyat melalui persaingan dalam pemilihan umum.

Melalui partai politiklah dilakukan seleksi dan rekrutmen elit dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing negara. Melalui partai politik juga dilakukan sosialisasi politik kepada masyarakat tentang tujuan dan gerak dari setiap partai politik. Tanpa sosialisasi politik masyarakat tidak akan mengenal partai politik dan para calon pemimpin yang akan bersaing dalam pemilihan umum karena melalui pemilu itulah terjadi pergantian dan seleksi elit. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan pembusukan politik atau *political decay*. Partai politik jugalah yang mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antar partai dan di sisi yang lain antara partai dan pemerintah. Partai politik merupakan mediator antara masyarakat dengan negara dan sebaliknya. Kehidupan partai politik tergantung pada sistem negara masing-masing. Di negara demokratis, partai politik mempunyai kebebasan untuk bergerak dan mengembangkan dirinya. Sebaliknya, di negara nondemokratis seperti di negara komunis atau otoriter, kehidupan partai politik sangat ditentukan oleh negara masing-masing dan tidak mempunyai ruang gerak yang bebas.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Negara modern yang demokratis adalah negara
 - A. dengan teritori yang sangat kecil dengan penduduk yang kecil pula
 - B. yang berpenduduk homogen
 - C. yang plural atau heterogen
 - D. dengan penduduk yang hanya mempunyai satu aspirasi saja

- 2) Partai politik adalah organisasi
 - A. untuk kumpul-kumpul sementara
 - B. yang bertujuan untuk membatalkan suatu kebijakan politik
 - C. yang bertujuan untuk melakukan kekerasan
 - D. untuk meraih kekuasaan melalui pemilihan umum

- 3) Partai politik diperlukan karena....
 - A. merupakan wadah dan penyalur aspirasi masing-masing kelompok
 - B. merupakan wadah organisasi terlarang
 - C. partai politik merupakan sarana untuk mengadili
 - D. dipakai untuk mengubah suatu sistem politik

- 4) Kehidupan partai politik di negara demokratis adalah
 - A. mempunyai kebebasan yang sangat terbatas
 - B. mempunyai kebebasan untuk tumbuh dan berkembang
 - C. dikendalikan oleh penguasa
 - D. mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas.

- 5) Sistem multipartai terdapat di
 - A. masyarakat yang homogen
 - B. negara-negara nondemokratis
 - C. masyarakat yang plural dan heterogen
 - D. negara monarki absolut.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Partai-Partai Politik di Indonesia**

Sebelum kemerdekaan, kita mengenal berbagai pergerakan kebangsaan baik organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ataupun organisasi yang bergerak menentang kekuasaan kolonial. Mendekati tahun 1920-an lahirlah berbagai organisasi yang bergerak dengan tujuan politik yaitu memperjuangkan nasib rakyat pribumi (Indonesia) agar dapat melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Organisasi-organisasi tersebut ada yang bersifat kooperatif dan nonkooperatif dengan kolonial dan berbagai organisasi tersebut pada umumnya masih membawakan kepentingan kelompok atau etniknya masing-masing. Hal tersebut dapat dimengerti karena sebelum diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, mereka belum menganggap sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, organisasi dan partai politik tersebut banyak yang meneruskan kiprahnya seperti organisasi Muhammadiyah, partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan beberapa lainnya.

Di masa pendudukan Jepang, semua partai politik dibubarkan dan Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang mewadahi partai-partai yang non-Islam, Masyumi yang mewadahi partai-partai Islam dan Fujinkai yang mewadahi organisasi-organisasi kaum perempuan. Mendekati berakhirnya Perang Dunia ke II, semua organisasi tersebut dibubarkan Jepang sehingga ketika Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, memproklamkan diri sebagai negara republik yang demokratis, Indonesia tidak mempunyai partai politik. Seperti kita ketahui, partai politik merupakan organisasi yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi.

Mengatasi hal tersebut Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat No. X pada bulan November 1945. Melalui Maklumat tersebut bertumbuhanlah partai-partai politik di Indonesia. Bagaimana gerak dari berbagai partai politik tersebut akan diuraikan dari masa Kolonial, masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan masa Reformasi. Dalam periode-periode tersebut akan terlihat bagaimana pergulatan masing-masing partai politik meraih kekuasaan.

A. MASA KOLONIAL

Di negara-negara jajahan, termasuk Indonesia, tersebar mitos bahwa ras kulit putih tidak terkalahkan. Akan tetapi, kekalahan armada laut Rusia pada tahun 1905 dari armada laut Jepang, mitos tersebut menjadi berubah. Setelah peristiwa tersebut, lahirlah berbagai gerakan pemuda yang pada waktu itu masih mengatas namakan kelompoknya masing-masing. Mereka berkeyakinan bahwa melalui perjuangan tanpa kekerasan, penjajahan akan dapat diakhiri. Gerakan-gerakan nasionalisme bersemi dalam berbagai organisasi pemuda. Meskipun pada waktu itu berbagai gerakan tersebut lebih bersifat sebagai organisasi yang masih mengatas namakan etnis masing-masing, tetapi pada prinsipnya gerakan mereka bertujuan untuk melepaskan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan di samping itu juga gigih berjuang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme.

Dari beberapa periode tersebut akan dipilih beberapa organisasi yang dianggap penting, yaitu organisasi yang mempunyai gerakan kuat dalam membangkitkan semangat rakyat, termasuk di dalamnya organisasi kaum perempuan dan organisasi yang merupakan akar bagi partai-partai yang tumbuh kemudian setelah kemerdekaan.

1. Budi Utomo

Organisasi pertama yang berdiri pada waktu itu adalah Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta oleh para pelajar Jawa, yaitu pelajar Stovia, sekolah kedokteran di Jakarta. Organisasi tersebut berdiri atas dorongan dokter Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan. Pada mulanya Budi Utomo hanya akan membatasi keanggotaannya pada etnis Jawa dan Madura saja dan hanya bergerak di bidang sosial seperti pendidikan dan tidak terjun ke bidang politik. Dokter Sutomo yang juga merupakan salah seorang pendiri, mendorong agar Budi Utomo gerakannya diperluas tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi juga ke politik. Dalam lima tahun sejak berdirinya, Budi Utomo telah mempunyai 40 cabang dengan anggota lebih kurang 10.000 orang. (A.K. Pringgogidgo, S.H., 1967: 2-3).

Ketika Budi Utomo mulai terjun ke politik, keanggotaan mulai menyebar ke seluruh Hindia Belanda tanpa membedakan keturunan, jenis kelamin maupun agama. Keanggotaan tidak hanya terbatas pada priyayi Jawa dan Madura saja, tetapi mencakup berbagai etnik di berbagai daerah lainnya. Dalam kongresnya di Semarang pada 26-28 September 1919, sudah terdapat

lebih dari 80 cabang dengan anggota masing-masing cabang sebanyak 2000 orang. (3). Dalam organisasi tersebut terdapat tokoh yang radikal, yaitu dokter Tjipto Mangunkusumo. Di samping itu, terdapat pula tokoh yang lebih memperhatikan bidang filsafat, yaitu dokter Radjiman Wedyodiningrat (M. Rusli Karim, 1983:15-16). Gerakan politik yang dilakukan Budi Utomo antara lain adalah menetapkan program politik yang bercita-cita mewujudkan pemerintahan parlementer berasaskan kebangsaan. Akira Nagazumi (1989) melihat lahirnya Budi Utomo sebagai titik tolak akan kebangkitan nasionalisme Indonesia dan ia berpendapat bahwa Budi Utomo merupakan organisasi nasional pertama yang tampil di Indonesia (256-257).

Budi Utomo juga memperjuangkan agar bangsa Indonesia disamakan kedudukannya di muka pengadilan. Organisasi ini bersama dengan Serikat Islam, Insulinde, dan I.S.D.V. menjadi anggota “*Radicale Concentratie*”, organisasi yang didirikan atas usul fraksi sosialis di *Volksraad*. Organisasi ini didirikan sebagai akibat perubahan politik di Eropa pada tahun 1918. *Radicale Concentratie* yang terdiri dari berbagai perkumpulan bangsa Indonesia saja dan perkumpulan campuran, menuntut adanya Majelis Nasional sebagai “parlemen pendahuluan” untuk menetapkan hukum dasar. (A.K. Pringgodigdo SH, 1967: 4-5).

2. Syarikat Islam

Organisasi berikutnya adalah Syarikat Islam (SI) yang didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1912 di Solo. Semula organisasi tersebut bernama Serikat Dagang Islam yang berdiri pada tahun 1911. Tujuan utama Syarikat Islam adalah memajukan perdagangan masyarakat Islam untuk menghadapi para pedagang Tionghoa. Pada waktu itu, berdirinya SI dapat menggerakkan emosi Islam dan SI dapat menyebar dari Aceh sampai ke Maluku dan menyentuh masyarakat dari lapisan atas sampai bawah (Deliar Noer, 1987:5-6). Di samping itu, SI juga bertujuan untuk membatasi kristenisasi yang dianggap menghina masyarakat Islam melalui ucapan para politisi di parlemen Negeri Belanda. Tujuan lain yang penting adalah mengikis feodalisme. Pringgodigdo menyebut SI sebagai gerakan nasionalistis-demokratis-religius-ekonomis. Pemimpin lain yang berpengaruh di SI adalah H.O.S. Tjokroaminoto yang sangat bersemangat dalam mengembangkan S.I. (Takashi Shiraishi, 1997: 86-91).

S.I berhasil menjangkau masyarakat Islam yang luas dan membentuk organisasi-organisasi cabang di berbagai daerah. Pada tahun 1915 di

Surabaya didirikan Central Sarekat Islam (C.S.I.). CSI ini bertujuan untuk membantu cabang-cabang di daerah. Dalam tubuh SI terdapat kelompok yang beraliran kiri dengan tokohnya Semaun dan Darsono yang mendapat pengaruh dari *Nationale Indische Partij* (N.I.P.) dan *Indisch Sociaal Democratische Vereniging* (I.S.D.V.). N.I.P memperjuangkan *Indisch nationalisme* dan I.S.D.V beraliran sosialisme kiri. Pada Oktober 1918, SI Nasional memutuskan kebijakan yang menentang pemerintah yang dianggap melindungi kapitalis. SI mengalami kemerosotan dengan adanya konflik dalam dirinya dan dari I.S.D.V yang setelah revolusi Merah pada 1917 ketika Rusia menjadi komunis karena kemenangan kaum Bolsyewik, I.S.D.V memutuskan untuk menjadi komunis. Pada waktu itu SI telah pecah menjadi SI Hijau dan SI Merah (komunis) (A. K. Pringgodigdo S.H., 1967: 5-8; Deliar Noer, 1987: 5-6; M. Rusli Karim, 1983: 35).

3. Organisasi-Organisasi/Perkumpulan Kedaerahan

Berbagai organisasi yang tumbuh pada masa ini pada umumnya masih berdasarkan pada kepentingan daerah atau etnik masing-masing. Hal tersebut dapat dimengerti karena mereka belum menyadari bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Pengertian satu bangsa baru mereka sadari sesudah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Tetapi dalam gerakannya, mereka semua bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang sangat miskin dan terbelakang karena eksploitasi kolonial.

Aspirasi para pemuda pada masa ini disalurkan dalam organisasi-organisasi yang berdasarkan pada kedaerahan seperti *Jong-Java* berdiri tahun 1918 di Solo. Jong Java bergerak untuk Jawa Raya termasuk Sunda Madura dan Bali. *Jong Sumatranen Bond* berdiri pada 9 Desember 1917. Kegiatannya banyak dilakukan di Jawa tempat para pemuda Sumatra belajar. Di antara tokohnya antara lain adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin. Perkumpulan pemuda lainnya adalah *Jong Minahasa (1918)* *Jong Ambon* dan *Jong Celebes*.

Di samping organisasi yang berdasarkan kedaerahan terdapat pula organisasi campuran, bangsa Indonesia dan bukan bangsa Indonesia yang bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang terkemuka pada waktu itu adalah **Nationale Indische Partij**, yang semula bernama Insulinde, didirikan di Bandung tahun 1907 untuk kepentingan mereka sendiri. Akan tetapi, pada tahun 1919 perkumpulan tersebut terbuka

untuk semua orang dengan tujuan untuk kemakmuran. Organisasi ini tampaknya tidak menghasilkan gagasan-gagasan politik yang berarti.

Organisasi campuran ini baru menampakkan gregetnya ketika lahir De Indische Partij oleh Dr. E.F.E. Douwes Dekker (Multatuli) pada Desember 1912 di Bandung. Ia seorang Belanda yang sangat memperhatikan nasib rakyat. Organisasi ini terbuka buat semua suku bangsa, baik orang Indonesia, peranakan, Eropa ataupun Tionghoa. Tujuan utama adalah kemerdekaan buat Indie (istilah Indonesia belum dikenal pada waktu itu) dan Indische Partij mengobarkan semangat patriotisme. Partai ini sangat radikal dalam gagasan-gagasannya seperti *Indische nasionalisme*, yaitu kemerdekaan sehingga dianggap membahayakan oleh pemerintah kolonial. Pemimpin lainnya adalah Tjipto Mangun Kusumo dan Suwardi Surjaningrat. Bulan Maret 1913 gerakan ini dilarang dan para pemimpinnya dibuang ke luar Jawa. ke Timor Kupang, Tjipto Mangunkusumo ke Banda dan Suwardi Surjaningrat ke Bangka. (Akira Nagazumi, 1997:293-294; M. Rusli Karim, 1983:22-24). Melalui *De Indische Partij* inilah semangat kebangsaan rakyat pada waktu itu semakin membesar. Meskipun IP memudar setelah para pemimpinnya ditangkap, tetapi IP telah berhasil membangun sikap anti pada kolonial, dan Douwes Dekker (Multatuli) yang orang Belanda dianggap berjasa besar bagi rakyat Indonesia.

4. I.S.D.V (*Indisch Sociaal Democratische Vereeniging*)

ISDV didirikan oleh Sneevliet pada tahun 1914 di Semarang. Organisasi ini menyebarkan prinsip-prinsip sosialis dan paham marxis dan internasionalisme di kalangan serikat pekerja. Meskipun organisasi tetap bersifat nasionalistis tetapi organisasi tidak dapat diterima oleh rakyat dan mencoba mempengaruhi organisasi-organisasi yang telah ada di antaranya Budi Utomo dan Sarikat Islam. Kedua organisasi ini menolak gagasan I.S.D.V. tersebut. Setelah kemenangan Revolusi Merah di Rusia pada tahun 1917, Rusia kemudian menjadi Uni Soviet. Kemudian, I.S.D.V pada tahun 1919 menjadi gerakan komunis. Sneevliet dikeluarkan dari Indonesia (A.K. Pringgodigdo SH, 1967:12-13; M.Rusli Karim, 1983: 24). Gerakan I.S.D.V dapat dipandang sebagai embrio gerakan komunis di Indonesia yang menyebarkan paham marxisme (Takashi Shiraishi, 1990:132-135).

B. ORGANISASI-ORGANISASI KEAGAMAAN

Di samping organisasi tersebut, di era ini terdapat pula organisasi keagamaan, yaitu **Muhammadiyah**, didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini hanya bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan saja. Gerakannya hanya dalam dakwah Islam yaitu “Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar” (membela yang benar dan mencegah yang salah) dan sama sekali tidak bertujuan menjadi partai politik (Mustafa Kamal Pasha dalam M. Rusli Karim, 1983: 21-22). Muhammadiyah membebaskan para anggotanya untuk memasuki berbagai organisasi politik. Organisasi tersebut memberikan tempat bagi kelompok perempuan. Organisasi ini merupakan gerakan yang modernis dan reformis (Takashi Shiraishi, 1997: 174-175).

Nahdatul Ulama (N.U), didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Kelahirannya sebagai reaksi terhadap kebangsaan dan golongan modernis. Organisasi ini khawatir apabila pengaruh Wahabi akan berkembang di Indonesia melalui Sarikat Islam dan Muhammadiyah. Organisasi ini juga terjun ke dunia politik. (A.K. Pringgodigdo S.H., 1967: 91; M. Rusli Karim, 1983:22). Terdapat pula beberapa organisasi yang berdasarkan pada agama Kristen, yaitu **Perkumpulan Katholik Djawi** yang berdiri pada 22 Februari 1925 di Yogyakarta dan bersifat kooperatif dengan tujuan untuk memajukan rakyat di bidang politik. Tokoh yang utama adalah I. J. Kasimo. Akhirnya, organisasi ini menjadi perkumpulan politik di Jawa sehingga organisasi ini bukan hanya untuk orang Jawa saja.

C. ORGANISASI PEREMPUAN

Pada masa ini cita-cita Kartini yang menginginkan anak-anak perempuan diberikan pendidikan agar dapat lepas dari kebodohan, mulai mempengaruhi perkumpulan perempuan. Ia berpendapat bahwa keterbelakangan perempuan disebabkan karena adat yang mengungkung anak-anak perempuan dengan membeda-bedakan perlakuan terutama di bidang pendidikan. Tetapi ia tidak dapat menolak ketika ia harus dipoligami oleh Bupati Rembang, R.M.A.A. Djojoadiningrat. Kartini meninggal pada tahun 1904 dalam usia 25 tahun. Gagasannya ditulis sebelum ia kawin. Pemikiran Kartini mempengaruhi kaum perempuan sehingga pada tahun 1912 dengan bantuan Budi Utomo, berdiri Putri Mahardika, organisasi perempuan lain adalah keutamaan istri,

dan berdiri sekolah-sekolah Kartini dengan tujuan untuk memajukan kaum perempuan (A. K. Pringgodigdo SH, 1967:18-20; Takashi Shiraiishi, 1997: 35-36).

Berbagai organisasi pergerakan yang tumbuh pada masa ini, meskipun berbeda-beda dan seakan-akan hanya mementingkan kelompoknya sendiri, tetapi gerakan mereka pada umumnya mencerminkan keprihatinan akan kondisi masyarakat di bawah pemerintahan kolonial. Rasa nasionalisme yang mulai bersemi pada waktu itu semakin menguat dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

1. Partai Nasional Indonesia

Organisasi berikutnya yang dapat membakar semangat nasionalisme dan anti kolonialisme adalah PNI (Partai Nasional Indonesia) Partai ini sangat militan dalam gerakannya sehingga pada 1930 PNI dibubarkan dan Soekarno dihukum 4 tahun penjara.

Begitu lahir, pada 4 Juli 1927 di pimpin oleh Soekarno, ia langsung mencanangkan bahwa partai ini tidak bersifat kooperatif. Tujuan yang utama dari PNI adalah meraih kemerdekaan. Tujuan tersebut telah membangkitkan militansi akan semangat nasionalisme di berbagai gerakan yang ada pada waktu itu. Para pemimpinnya yang terkemuka adalah mereka yang tidak bekerja pada pemerintah kolonial dan bekas anggota PI (Perhimpunan Indonesia) seperti Mr. Sartono, Mr. Soeyudi, Mr. Iskaq, Dr. Samsi, Mr. Budiarto, dan Mr. Ali Satroamidjojo. (A.K. Pringgodigdo, SH, 1967: 55-62). Begitu militannya Soekarno menggerakkan PNI, ia akhirnya ditangkap pada 1930. PNI lahir kembali sebagai partai politik negara 14 hari setelah proklamasi pada Agustus 1945 tetapi 10 hari kemudian dibubarkan dan muncul PNI baru bersamaan dengan partai-partai lain pada bulan November 1945 (Herbert Feith & Lance Castles, ed., 1988:136-138).

Gerak PNI bukan hanya pada lapisan atas saja, golongan aristokrat, dan intelektual, tetapi juga menyentuh lapisan rakyat bawah dan para anggotanya terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan juga perempuan. Soekarno dengan kemampuannya berpidato dapat menggugah semangat masyarakat akan perlunya gerakan untuk melepaskan diri dari pemerintahan kolonial. Sebelum lahirnya PNI, Soekarno telah membuat sebuah artikel dalam *Suluh Indonesia Muda* pada tahun 1924, yaitu Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. (Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*: jilid I). Artikel tersebut menguraikan perlunya persatuan dari ketiga golongan tersebut agar merupakan suatu

kekuatan. Pemikiran Soekarno tersebut kelak menjadi konsep Nasakom dalam Demokrasi Terpimpin. Pidato-pidatonya berhasil membakar semangat rakyat pada waktu itu. Kelahiran PNI merupakan momen yang baik karena diperkuat oleh semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

2. Partai Indonesia (P.I. atau Partindo)

Ketika PNI dibubarkan banyak anggotanya masuk ke dalam Partai Indonesia. Partai ini diperkuat oleh Komite Perikatan Golongan Merdeka yang berdiri pada 30 April 1931 di Jakarta untuk memperkokoh kedudukan Partai Indonesia. Partai Indonesia diikuti dengan lahirnya Pendidikan Nasional Indonesia pada Desember 1933 di Yogyakarta dengan prinsip nasionalisme dan demokrasi. Ketika Soekarno keluar dari penjara dan melihat partai yang didirikannya, Partai Nasional Indonesia, menjadi berantakan ia memutuskan masuk ke Partai Indonesia pada Agustus 1932 dan menjadi ketuanya. Tujuan partai ini adalah Indonesia Merdeka memperjuangkan perluasan hak-hak politik dan demokrasi dan perbaikan ekonomi rakyat. Gerak langkah partai ini sama dengan PNI Soekarno, yaitu nonkooperasi atau *self help* dan netral terhadap agama. Gerakan partai politik ini sangat gigih dalam memperjuangkan nasib rakyat sehingga kolonial merasa terancam sehingga Soekarno ditangkap. Akhirnya, pada November 1936 partai ini dibubarkan oleh Mr. Sartono (A.K.Pringgodigdo, SH, 1967:108-110; M. Rusli Karim, 1983: 40-42).

3. Partai Komunis Indonesia

Pada 23 Mei 1920 I.S.D.V. menjadi Partai Komunis Indonesia dan pada 24 Desember 1920 masuk ke dalam organisasi Internasional Komunis (Komintern) sebagai satu bagian dari organisasi tersebut. Organisasi tersebut anti Pan-Islamisme. (M. Rusli Karim, 1923:26). Ketika itu banyak anggota Sarikat Islam yang berhaluan kiri (SI Merah) dan ketika PKI mengumumkan akan melakukan disiplin partai, kelompok SI Merah dikeluarkan dari Sarikat Islam. Kelompok komunis ini mulai terang-terangan mengakui pemimpin-pemimpin Soviet seperti Lenin dan Trotsky. Tokoh yang berperan pada waktu itu adalah Tan Malaka, Semaun dan Darsono. Tan Malaka diusir dari Indonesia, sesudah terlibat dalam dalam pemogokan pegawai rumah gadai negara pada Januari 1922. Ia pergi ke Berlin (Jerman), Moskow, dan negeri Belanda. Sepeninggal Tan Malaka, Semaun yang baru kembali dari Moskow mengambil alih kepemimpinan PKI.

Di bawah kepemimpinan Semaun, PKI diperkuat oleh Alimin dan Muso dan PKI berkembang meluas ke seluruh Indonesia. PKI membentuk organisasi Serikat Rakyat setelah kongresnya pada Juni 1924. PKI merancang suatu pemberontakan yang disebut “Pemberontakan 1926” dengan mengerahkan para pendukung dari Jawa Barat, Tengah dan Timur, Sumatra Barat. Pemberontakan tersebut gagal dan puluhan ribu anggota PKI dibuang ke Digul (M. Karim Rusli, 1983: 27). Bila organisasi-organisasi lain bergerak dengan cara damai, PKI melakukan kegiatannya dengan cara kekerasan

4. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Didirikan pada 24 Mei 1937 dengan ketuanya Drs. A.K. Gani, ketua mudanya Mr. Sartono dan sekretarisnya Wilopo. Tujuan utama adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan pada demokrasi politik, ekonomi dan sosial untuk menuju ke keadilan sosial. Caranya adalah dengan cara-cara demokratis. Meskipun partai ini bersifat kooperatif, partai ini tetap membela kepentingan Indonesia. Salah satu tindakannya adalah meminta pada pemerintah untuk melepaskan tokoh-tokoh yang ditahan pemerintah. Saingan partai ini adalah Parindra dan Pasundan dalam pemilihan untuk Dewan Rakyat (A.K. Pringgodigdo, S.H., 1967: 110-111).

5. Partai Rakyat Indonesia (PRI)

Setelah dibubarkannya PNI-Soekarno, para bekas anggotanya mulai memasuki partai-partai baru yang sejalan dengan aspirasi mereka. Mereka antara lain masuk menjadi anggota PRI yang didirikan pada 14 September 1930 di Jakarta, oleh M.Tabrani Tujuan utama adalah kemerdekaan Indonesia melalui parlementer. Langkah pertama adalah otonomi Indonesia dengan dasar “dominion status” yang dipimpin orang Indonesia. Partai ini mendapat tantangan dari P.P.P.I. (perkumpulan mahasiswa yang bersikap kooperatif dan mempunyai pengaruh besar), BU dan pendapat umum yang menganggap partai ini tidak jujur dengan mengambil para pengikut. Partai ini tidak dapat menjangkau rakyat bawah dan baru dapat membentuk dua atau tiga cabang kecil, kemudian lenyap dari pergulatan politik pada waktu itu. (A.K. Pringgodigdo, S.H., 1967: 113-114; M. Rusli Karim, 1983: 48).

6. Partai Persatuan Indonesia (Parpindo)

Parpindo didirikan oleh Moh. Yamin yang sebelumnya menjadi anggota Gerindo dan Partindo. Bersifat kooperatif, duduk dalam Dewan Rakyat.

Partai ini tidak mengakar ke rakyat tetapi merupakan partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat yaitu dengan sosial-nasionalisme dan sosial demokrasi. Hanya Moh. Yamin saja dari para pemimpinnya yang berpendidikan tinggi (A. K. Pringgodigdo, 1967:111-112).

7. Persatuan Bangsa Indonesia (P.B.I.)

PBI lahir di Surabaya dari *Studieclub* Dr. Sutomo yang pada 16 Oktober 1930 dapat dimasuki oleh setiap orang, bukan hanya terbatas pada para mahasiswa saja. Hal ini membuka kesempatan yang baik bagi semua orang yang ingin bergerak untuk bangsa Indonesia, setelah dibubarkannya Partai Nasional Indonesia pada 1930. Nama *Studieclub* kemudian berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia yang dicanangkan pada 4 Januari 1931. Tujuannya yang utama adalah “menyempurnakan derajat” Bangsa dan Tanah Air, berdasarkan kebangsaan Indonesia yang tidak lain adalah mencapai tanah air yang Merdeka dan Mulia-Raya, yaitu kemerdekaan. PBI bersikap netral terhadap agama, nonkooperasi, memperhatikan masalah koperasi (ekonomi), pendidikan, membentuk perkumpulan kaum tani berdasarkan koperasi. Bulan Desember 1935 dilakukan fusi dengan Budi Utomo dan menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Pemimpinnya yang berpengaruh adalah Dr.Sutomo dan Mr. Subroto (A.K. Pringgodigdo, SH, 1967:115-116).

8. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Dalam kongres di Solo pada bulan Desember 1935, lahirlah Parindra sebagai hasil fusi dari Partai Bangsa Indonesia dan Budi Utomo. Dr Sutomo adalah pemimpin yang pertama kemudian pada Desember 1938, ia digantikan oleh K.R.M.H. Wuryaningrat setelah Dr. Sutomo meninggal. Dalam kongres itu pula kemudian bergabung Sarikat Sumatra dan Partai Sarekat Selebes. Tujuan yang utama adalah Indonesia Raya atau Indonesia Mulia, memperkokoh semangat persatuan kebangsaan Indonesia, aksi politik, sistim pemerintahan berlandaskan demokrasi dan nasionalisme dan memajukan ekonomi dan sosial. Parindra memulai dengan 53 cabang dan 2.425 anggota. Gerakannya dapat menyentuh rakyat bawah yaitu kelompok tani dengan mengembangkan rukun tani. Cabang dan keanggotaannya terus meningkat. Di tahun yang sama cabangnya menjadi 57 dengan anggota 2.700. Prinsip Parindra bukan kooperatif atau nonkooperatif (A.K. Pringgodigdo, SH, 1967: 116-118; M. Rusli Karim, 1983: 43-44).

9. Masa Penjajahan Jepang

Kekuasaan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 dan pemerintahannya tidak membawa perubahan yang berarti bagi Indonesia. Rakyat semula mengharapkan perbaikan nasib tetapi apa yang terjadi justru pemerintahan Jepang yang tidak kurang kejamnya seperti kolonial Belanda. Hal ini justru menumbuhkan semangat nasionalisme yang semakin membesar (George McT. Kahin, 1963: 555). Selama pendudukan Jepang, semua partai dan organisasi-organisasi sosial dan masyarakat dibubarkan. Jepang mewadahi semua partai politik yang berorientasi Islam ke dalam **partai Masyumi**, partai non-Islam ke dalam **Putera (Pusat Tenaga Rakyat)** dan organisasi-organisasi perempuan ke dalam **Fujinkai**.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tujuan berbagai organisasi pergerakan kebangsaan di masa kolonial.
- 2) Jelaskan mengapa organisasi pada masa kolonial masih mengatasnamakan kelompok atau etnisnya masing-masing.
- 3) Jelaskan secara garis besarnya, warna dari berbagai gerakan kebangsaan pada waktu itu.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Meskipun berbagai gerakan kebangsaan pada waktu itu ada yang bersifat kooperatif dan nonkooperatif, tujuan mereka adalah sama yaitu bagaimana mencerdaskan bangsa dan memperbaiki kehidupan rakyat yang terpuruk dalam kemiskinan karena eksploitasi penjajahan. Mereka semua pada akhirnya bertujuan untuk membebaskan diri dari kolonialisme.
- 2) Pada masa kolonial, pengertian kebangsaan belum dipahami oleh para pemimpin pergerakan tersebut. Pengertian atau paham kebangsaan baru mereka sadari sesudah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Sesudah peristiwa tersebut gerakan mereka menjadi keras dan tegas yaitu kemerdekaan Indonesia.

- 3) Gerakan-gerakan kebangsaan dan partai-partai politik pada waktu itu dapat dipetakan dalam gerakan yang bersifat agama, yaitu Islam seperti Syarikat Islam dan Nahdatul Ulama, Kristen dan Katholik. Berikutnya yang bersifat sosialis, yaitu sosialis demokrat dan sosialis Marxist. Kemudian adalah gerakan yang bersifat nasionalistis.



RANGKUMAN

Lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 merupakan titik tolak mulai bangkitnya kesadaran masyarakat pribumi akan keadaan mereka yang terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan. Kesadaran akan hal tersebut menjadi semakin meluas dan menguat dengan kelahiran Sarikat Islam pada tahun 1912 di Solo. Para tokoh pergerakan menyadari hal tersebut bahwa kolonialisme hanya melakukan eksploitasi terhadap daerah jajahannya. Beranjak dari keadaan tersebut, lahirlah berbagai gerakan kebangsaan lainnya baik yang bersifat keagamaan, etnik, ataupun ideologis. Meskipun berbagai gerakan tersebut masih mengatas namakan kelompok, etnik, agama dan daerah mereka masing-masing dan meskipun juga gerakan mereka masih bersifat lunak terhadap pemerintahan kolonial tetapi mereka mempunyai satu tujuan yaitu bagaimana mengangkat masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Sarikat Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat karena Islam merupakan agama mayoritas. Lahirnya PNI pada 4 Juli 1927 yang sejak kelahirannya menolak bekerja sama dengan kolonial serta langsung memperjuangkan kemerdekaan, telah memberikan warna yang baru bagi gerakan kebangsaan.

Lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 telah memberikan semangat baru bagi berbagai gerakan kebangsaan tersebut. Tuntutan mereka menjadi tegas dan pasti yaitu memperjuangkan kebebasan dan nasionalisme. Prinsip cinta bangsa mulai menjadi fokus perjuangan mereka. Para tokoh partai dan organisasi adalah mereka dengan latar belakang pendidikan Barat yang dipenuhi oleh kecintaan mereka terhadap rakyat dan tanah air mereka. Organisasi-organisasi mulai membuka diri untuk berbagai kelompok, etnis ataupun agama, tidak lagi hanya mementingkan kelompoknya saja.

Menurut M. Rusli Karim, pada masa ini, kita dapat memetakan perjuangan mereka dalam partai-partai politik yang bersifat agama, yaitu

Islam seperti Sarikat Islam dengan tokohnya antara lain adalah HOS Tjokroaminoto dan Agus Salim sedangkan di Nahdatul Ulama dengan tokohnya antara lain adalah KH Hasyim Asyhari, KH Wachid Hasyim, KH Machfudz Shiddiq. Di kalangan Agama Kristen dan Katholik, tokohnya antara lain adalah I. J. Kasimo. Sosialis-demokrat dengan tokoh antara lain Sutan Syahrir sedang sosialis-Marxist adalah Semaun, Muso, Darsono. Di kalangan nasionalis, Soekarno dan Hatta. Para tokoh terus berperan dalam perpolitikan pascakolonial.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Gerakan kebangsaan pada masa kolonial bersifat
 - A. nasional
 - B. kedaerahan atau primordial
 - C. duplikasi dari negara-negara Barat
 - D. revolusi atau kekerasan fisik

- 2) Tujuan dari gerakan kebangsaan pada masa itu adalah
 - A. merumuskan kebijakan negara
 - B. memperbaiki nasib rakyat dari kebodohan dan kemiskinan
 - C. memperjuangkan kepentingan kelompok mayoritas
 - D. memperjuangkan ideologi tertentu

- 3) Lahirnya Budi Utomo dan Sarikat Islam merupakan
 - A. hal yang merisaukan masyarakat pada waktu itu
 - B. titik tolak bangkitnya rasa kebangsaan menghadapi kolonialisme
 - C. organisasi yang memecah belah gerakan-gerakan kebangsaan
 - D. organisasi yang melahirkan gerakan komunisme

- 4) Lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 membawa dampak pada
 - A. melemahnya gerakan kebangsaan pada masa itu
 - B. tersisihnya para pemimpin yang tidak berpendidikan Barat.
 - C. semakin menguatnya gerakan akan kebebasan dan rasa nasionalisme
 - D. munculnya gerakan yang didominasi kelompok tertentu saja

- 5) Gerakan kebangsaan pada masa kolonial bersifat gerakan ...
- A. agama
 - B. terorisme
 - C. yang bersifat agama, sosialis dan nasionalis
 - D. mendahulukan kepentingan ideologi tertentu

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Partai Politik sebagai
Kekuatan Sosial Politik****KEPARTAIAN SESUDAH KEMERDEKAAN**

Uraian tentang kepartaian yang merupakan wadah bagi bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan politik sesudah kemerdekaan, akan terdiri dari beberapa periode, yaitu Sistem Politik Demokrasi Parlementer (1945 – 1959), Sistem Politik Demokrasi Terpimpin (1959–1966), Sistem Politik Demokrasi Pancasila (1966 -1998), dan Sistem Politik Masa Reformasi (1998–sampai sekarang). Dalam sistem-sistem politik tersebut, sejak kemerdekaan hingga tahun 2014, kita telah mengalami 11 kali pemilu dengan berbagai kekuatan-kekuatan sosial politik yang tercermin dengan bertumbuhannya berbagai partai politik baru di setiap sistem politik tersebut di atas. Kita akan melihat naik turunnya atau pasang surutnya beberapa partai politik dalam perpolitikan di setiap sistem politik tersebut. Untuk membahas hal-hal tersebut akan dikemukakan terlebih dahulu tabel-tabel tentang partai-partai politik sebagai peserta pemilu.

Tabel-tabel tersebut menunjukkan bahwa dari sejak kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai (lihat Tabel I). Akan tetapi, dalam setiap sistem politiknya sistem kepartaian tersebut berbeda-beda seperti di masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno hanya membolehkan hidupnya 10 partai sedang di masa Orde Baru, melalui fusi partai 1973, partai menjadi dua PPP dan PDI dan Golkar sebagai organisasi sosial yang berperan sebagai partai politik. Pasca Orde Baru, masa reformasi, partai politik dapat tumbuh bebas karena di masa ini Indonesia memasuki masa demokratisasi. Partai politik selalu berkaitan dengan sistem pemilu. Sejak 1955 sampai 1999 Indonesia menganut sistem pemilu proporsional dan pada pemilu 2004 sistem proporsional dikombinasi dengan sistem distrik dengan nomor urut. Pemilu 2009 sama seperti tahun 2004 tetapi dengan suara terbanyak (lihat Tabel III). Sistem pemilu 2014 dengan sistem proporsional terbuka dengan perolehan suara terbanyak. Perubahan sistem pemilu tersebut berkaitan dengan tuntutan demokratisasi sejak masa reformasi. Dalam tabel II kita juga melihat bahwa partisipasi politik rakyat dalam setiap pemilihan umum dapat dikatakan tinggi berkisar sekitar 90%.

Tabel 1.1

Sejarah Perkembangan Partai Politik Indonesia 1908-2009

Sumber: Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi rev (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008) hal., 455-457

Periode	Sistem Pemerintahan	Sistem Keptaiaan	Jumlah Partai
1908-1942	Zaman Kolonial	Sistem Multi Partai	-
1942-1945	Zaman Pendudukan Jepang	Partai Politik Dilarang	-
17/08/1945-1959	Zaman Demokrasi Parlemerter Masa Perjuangan		
17/08/45-14/11/45	Sistem Presidential; UUD 1945	Sistem Satu Partai	PNI
14/11/45-Agustus/49	Sistem Parlemerter; UUD 1945	Sistem Multi Partai	
1949-1950	Sistem Parlemerter; UUD RIS	Sistem Multi Partai	
1950-1955	Masa Pembangunan Sistem Parlemerter; UUD 1950	Sistem Multi Partai	27 Partai & 1Perorangan
1955-1959	Sistem Parlemerter; UUD 1950	Sistem Multi Partai	
1959-1965	Demokrasi Terpimpin; UUD 1945 1959	Penyederhanaan Partai berdasarkan Maklumat Pemerintah 03/11/45. Masyumi dan PSI dibubarkan tahun 1960. Sisa: PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arujdi, IPKI, Partai Islam Perti	10 Partai
	1960	Dibentuk Front Nasional yang mewakili semua kekuatan politik. PKI masuk berdasarkan prinsip Nasakom. ABRI masuk lewat IPKI	
1965-1998	Demokrasi Pancasila; UUD 1945	Penyederhanaan Partai	2 Partai & Golkar
	1966	Pembubaran PKI dan Partindo	

Periode	Sistem Pemerintahan	Sistem Kepartaian	Jumlah Partai
	27/07/1967	Konsensus Nasional a.l. 100 anggota DPR diangkat	
	1967-1969	Eksperimen dwipartai dan dwigrup dilakukan di beberapa kabupaten di Jabar, namun dihentikan pada wal 1969.	
	1971	Pemilihan Umum dengan 10 Partai	
	1973	Penggabungan partai menjadi 3 partai yaitu Golkar, PDI, dan PPP.	
	1977, 1982, 1987, 1992, 1997	Pemilihan Umum hanya diikuti oleh tiga orsospol PPP, Golkar dan PDI.	
	1982	Pancasila satu-satunya asas.	
	1984	NU kembali ke Khittah.	
	1996	PDI pecah.	
1998 . . .	Reformasi; UUD 1945 yang diamandemen 1999 (Juni) 2004 (April) 2009 2014	Sistem Multi Partai (Demokratisasi) Pemilu dengan 48 partai; 21 partai masuk DPR. Pemilu dengan 24 partai; 7 partai masuk DPR, yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PKS, PAN, Partai Demokrat. 38 partai politik (6 partai lokal (Aceh)) 12 partai politik nasional 3 partai politik lokal Aceh	

Tabel 1.2
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia (dalam jutaan)

Tahun Pemilihan	Penduduk	Pemilih Terdaftar	Yang Gunakan Hak	% Terhadap Pemilih	Suara Sah	% Terhadap Pemilih	% Sah Terhadap yang Gunakan Hak
1955	77,9	43,1	39,4	91	37,9	88	96
1971	114	58,6	58,2	99	54,7	93	94
1977	128	70,4	68,0	97	64,0	91	94
1982	146,5	82,1	78,2	95	75,1	92	96
1987	162,9	94,0	90,4	96	85,8	91	95
1992	177,6	107,6	102,3	95	97,8	91	96
1997	196,3	124,7	117,5	94	113	90	96
1999	209,4	118,2	116,3	98,4	105,8	89	90,2
2004 (Legislatif)	216	148	124,42	84	113,49	76	91
2004 (Pilpres I)	216	150,5	119,5	79,4	118,7	78,3	99,3
2004 (Pilpres II)	216	150,6	116,6	77,4	114,3	75,9	98
2009 (Pilpres III)							

Tabel 1.3
Pemilihan Umum di Indonesia

Tahun Pemilu	Zaman Pemerintahan	Sistem Pemilu	Jumlah Partai
1945-1959	Zaman Demokrasi Parlemen	Sistem Proporsional	27 Partai
1959-1965	Zaman Demokrasi Terpimpin	Sistem Proporsional	10 Partai
1965-1998	Zaman Demokrasi Pancasila Tahun 1971 Tahun 1977 Tahun 1982	Sistem Proporsional Sistem Proporsional Sistem Proporsional Sistem Proporsional	9 Partai & Golkar 9 Partai & Golkar 2 Partai & Golkar 2 Partai & Golkar 2 Partai & Golkar

Tahun Pemilu	Zaman Pemerintahan	Sistem Pemilu	Jumlah Partai
	Tahun 1987 Tahun 1992 Tahun 1997	Sistem Proporsional Sistem Proporsional	2 Partai & Golkar 2 Partai & Golkar
1998-2014	Zaman Reformasi Tahun 1999 Tahun 2004 Tahun 2009 Tahun 2014	Sistem Proporsional Sistem Proporsional dikombinasi dengan sistem distrik Sistem Proporsional dikombinasi dengan sistem distrik Sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak	48 Partai 24 Partai 38 Partai (6 partai local (Aceh)) 12 Partai (2 Partai Local Aceh)

A. PARTAI POLITIK MASA DEMOKRASI PARLEMENTER 17 AGUSTUS 1945 – 1959

Setelah proklamasi, dari 17 Agustus 1945 – 14 November 1945 kita menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945. PNI yang pada masa kolonial tahun 1930 dibubarkan, namun lahir kembali ketika Indonesia merdeka dengan tujuan untuk menjadi partai tunggal. Dengan terbitnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan masyarakat untuk mendirikan partai politik, PNI bukan merupakan partai tunggal tetapi salah satu dari partai politik yang banyak bertumbuhan. Maklumat tersebut bertujuan untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara Republik yang demokratis karena negara dengan satu partai, bukanlah negara demokratis.

Segera sesudah itu pada tanggal 14 November 1945 sistem politik dari presidensial berubah menjadi parlementer sampai lahirnya Demokrasi Terpimpin pada 5 Juli 1959, sistem politik kembali ke sistem politik presidensial dengan tetap memakai sistem multipartai. Perlu diingat sampai tahun 1955, Indonesia belum pernah melakukan pemilihan umum. Jadi, yang berperan sebagai badan legislatif adalah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Di samping berperan sebagai badan legislatif yang mewadahi aspirasi rakyat, KNIP juga berperan sebagai badan pembantu presiden. Hal

tersebut dituangkan dalam keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 22 Agustus 1945 (Deliar Noer & Akbarsyah, 2005: 19-29).

Keputusan tersebut menyatakan bahwa KNIP berfungsi sebagai berikut.

1. menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka;
2. mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat;
3. membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum;
4. membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia, dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum (Koesnodiprodo, dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005: 19).

Mengacu pada keputusan PPKI tersebut, KNPI juga memegang pula fungsi pemerintah, yaitu sebagai pembantu Presiden. Fungsi-fungsi tersebut, adalah

1. alat mempersatukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan;
2. alat yang menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat dan menyampaikan keinginan rakyat pada pemerintah;
3. alat yang memajukan kesejahteraan umum dan menjaga ketenteraman keselamatan umum (Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005: 20).

Anggota KNIP pada waktu itu bukanlah hasil pemilihan umum karena sejak kemerdekaan sampai tahun 1950, Indonesia masih disibukkan dengan perjuangan Belanda yang belum sepenuhnya melepaskan Indonesia. Soekarno dan Moh. Hatta pada tanggal 19 Agustus, membicarakan mengenai keanggotaan KNIP, yaitu diambil dari beberapa golongan dalam masyarakat, ditambah dengan “wakil-wakil aliran dari golongan baru” dalam masyarakat. Jumlahnya ditetapkan sebagai 60 orang. Ketika dilantik tanggal 29 Agustus 1945, jumlah anggotanya lebih kurang 135 atau 137 anggota. Dan KNIP dinyatakan oleh Soekarno, “...siapa sedia menjalankan perintah”. Selanjutnya, “...kekuasaan adalah di tangan presiden”. Ini berarti bahwa KNIP merupakan pembantu untuk menjalankan kekuasaan tersebut (Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005: 22).

Penunjukan anggota-anggota dari berbagai kekuatan antara lain dari partai politik hanya berdasarkan perkiraan saja. Jadi tidak berdasarkan atas kekuatan riil partai politik. Sebelum pemilu 1955, pemilihan umum sudah dijanjikan akan diadakan pada 5 Oktober 1945 tetapi hal tersebut tidak terjadi meskipun pada waktu itu sudah bermunculan partai-partai politik setelah diundangkan Maklumat Wakil Presiden M. Hatta pada 3 November 1945. Pada tanggal 7 November berdiri Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Ada pula Partai Sosialis yang merupakan gabungan antara Partai Sosialis Indonesia pimpinan Amir Syarifuddin dan Partai Rakyat Sosialis pimpinan Sutan Syahrir. Kemudian lahir partai-partai kecil seperti Partai Kristen Indonesia atau Parkindo pada 10 November 1945; Partai Katolik Indonesia pada 21 Oktober 1945, dan pada 21 Oktober 1945 berdiri Partai Komunis Indonesia; serta tanggal 9 November 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia (Kahin, 1970: 61).

Sampai Desember 1949 Indonesia disibukkan oleh perjuangan fisik di satu sisi dan di sisi lain terjadi instabilitas politik karena jatuh banggunya kabinet setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda. Dalam keadaan kemelut politik tersebut terjadi peristiwa yang mengejutkan dan mungkin peristiwa tersebut itulah yang mendorong segera dilakukannya pemilihan umum. Peristiwa tersebut terjadi pada 17 Oktober 1952 di mana pada waktu itu pimpinan militer menekan Soekarno untuk membubarkan parlemen. Militer menganggap bahwa parlemen bukanlah hasil pilihan rakyat dan parlemen dianggap sebagai sumber instabilitas politik. Ketika itu Indonesia masih menganut sistem politik parlementer di mana partai politik punyai peranan di bidang politik yang besar di parlemen. Soekarno menolak hal tersebut dan menjanjikan pemilu pada tahun 1955. Pemilu tersebut dianggap sebagai pemilu yang paling bersih dan jujur dibandingkan dengan pemilu-pemilu lainnya.

Pemilu 1955 menghasilkan 27 partai politik dan sebuah kursi untuk perorangan. Dari 27 partai politik tersebut keluar 4 (empat) besar, namun tanpa partai mayoritas. (lihat tabel IV a dan IV b) Ini berarti bahwa kemungkinan akan terjadi instabilitas politik seperti sebelum pemilu akan terulang lagi. Dua partai Islam Masyumi dan NU sebagai kekuatan politik Islam, membawa bendera masing-masing. Di samping pemilu untuk parlemen atau DPR, diselenggarakan juga pemilu untuk Dewan Konstituante. Dewan ini bertugas untuk merumuskan UUD 1945 yang masih bersifat sementara menjadi UUD 1945 yang tidak lagi sementara. Hasil pemilu

tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat partai mayoritas seperti yang diharapkan oleh Soekarno agar dapat stabilitas politik. Seandainya Masyumi dan NU membawa satu bendera, Islam akan keluar sebagai kekuatan mayoritas. Di samping itu, masih terdapat partai PSII, Partai Sarikat Islam Indonesia yang juga berdiri sendiri (lihat Tabel IV a).

Tabel 1.4a
Hasil Pemilu 1955

Partai	Suara	Persentase	Kursi
PNI	8.434.653	22,3	57
Masyumi	7.903.886	20,9	57
NU	6.955.141	18,4	45
PKI	6.176.914	16,4	39
PSII	1.091.160	2,9	8
Parkindo	1.003.325	2,6	8
Partai Katolik	770.740	2,0	6

Sumber: A. van Marle, *The First Indonesian Parliamentary Elections*, Indonesia (1956) dalam Herbert Feith, *P emilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999) hal 84-85.

Mengapa Masyumi dan NU tidak dapat bersatu, karena akar budaya politik mereka berbeda. Akar budaya NU adalah di Jawa yang sebelum kedatangan Islam di Jawa telah berkembang budaya Hindu-Budha selama 1000 tahun dan ketika Islam masuk ke Jawa budaya tersebut tidak hilang. Pertemuan kedua budaya tersebut melahirkan apa yang disebut sinkretisme yang melahirkan nilai-nilai yang akomodatif. Akar budaya Masyumi adalah di luar Jawa terutama di Sumatra Barat yang hampir tidak tersentuh budaya Hindu-Budha.

Tabel 1.4b
Partai Peserta Pemilu 1955

No	Partai	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
1	PNI	8.434.653	9.070.218	+635.565
2	Masyumi	7.903.886	7.789.619	-114.267
3	NU	6.955.141	6.989.333	+34.192
4	PKI	6.176.914	6.232.512	+55.598

No	Partai	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
5	PSII	1.091.160	1.059.922	-31.238
6	Parkindo	1.003.325	988.810	-14.515
7	Partai Katolik	770.740	748.591	-22.149
8	PSI	753.191	695.932	-57.259
9	IPKI	539.824	544.803	+4.979
10	Perti	483.014	465.359	-17.655
11	GPPS	219.985	152.892	-67.093
12	PRN	242.125	220.652	-21.473
13	PPPRI	200.419	179.346	-21.073
14	Partai Murba	199.588	248.633	+49.045
15	Partai Buruh	224.167	332.047	+107.880
16	PRI	206.261	134.011	-72.250
17	PIR-Wongsonegoro	178.481	162.420	-16.061
18	PIR-Hazairin	114.644	101.509	-13.135
19	Permai (Persatuan Marhaen Indonesia)	149.287	164.386	+15.099
20	Baperki	178.887	160.456	-18.431
21	Gerinda	154.792	157.976	+3.184
22	Partai Persatuan Daya	146.054	169.222	+23.168
23	PRIM	72.532	143.907	+71.375
24	AKUI	81.532	143.907	+71.375
25	Acoma	64.514	55.844	-8.670
26	PPTI	85.131	74.913	-10.218
27	PRD	77.919	39.278	-38.641
28	R. Soedjono Prawirosoedarso dkk	53.306	38.356	-14.949

Sumber: A. van Marle, *The First Indonesian Parliamentary Elections, Indonesia* (1956) dalam Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999) hal 84-85

Beragannya kekuatan politik partai, melahirkan guncangan-guncangan politik baik di legislatif ataupun di eksekutif. Pada masa demokrasi parlementer, PNI dan Masyumi silih berganti memegang pemerintahan dan kabinet. Masa kabinet tidak ada yang berumur sampai 5 tahun. Apa yang terjadi pada masa ini disebut sebagai *cultural politics* (Donald Emmerson, 1976: 19-32), yaitu konflik-konflik politik yang disebabkan karena perbedaan budaya politik. Sesudah pemilu 1955 konflik horizontal sangat tinggi, yaitu DI/TII, PRRI, Daud Burueuh, berbagai dewan di Sumatra Selatan, Permesta, dan lain-lainnya. Untuk mengatasi berbagai konflik tersebut diberlakukan UU Darurat Perang pada 3 Maret 1957. Di sini tampaknya terdapat kerja

sama antara Soekarno yang menangani masalah sipil, “menjinakkan” partai-partai politik dan militer yang menangani masalah berbagai konflik daerah yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Soekarno dalam pidatonya tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan 2 (dua) Konsepsi, yaitu tentang Kabinet Gotong Royong yaitu kabinet yang menteri-menterinya merangkul empat partai besar (Masyumi, PNI, NU, dan PKI). Konsepsi lainnya adalah tentang Dewan Nasional, sebuah dewan yang beranggotakan semua golongan fungsional dalam masyarakat termasuk di dalamnya ke 4 (empat) Kepala Staf Angkatan Bersenjata (AD, AU, AL, dan Polri). Konsepsi tersebut merupakan langkah Soekarno menuju Demokrasi Terpimpin yang diwujudkan melalui Dekrit 5 Juli 1959. Partai-partai dalam parlemen banyak yang tidak menyetujui pidato tersebut. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan II yang memerintah selama 2 tahun dengan koalisi 3 besar, Masyumi, PNI dan NU, tidak dapat mengatasi kemelut politik yang terjadi pada waktu itu. Krisis politik (Herbert Feith: 1962, 462-556) ini memuncak dengan keluarnya Masyumi dari kabinet dan Soekarno membubarkan Dewan Konstituante, sebuah dewan yang merumuskan UUD yang masih bersifat sementara untuk menjadi UUD yang tidak lagi bersifat sementara. Akhir dari kemelut politik tersebut, Dekrit 5 Juli 1959 dilaksanakan dan Indonesia memasuki sistem politik Demokrasi Terpimpin dan UUD 1945 diberlakukan dengan penuh.

B. PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN 1959 – 1965

Sistem politik berubah dari parlementer menjadi presidensial. Soekarno sekarang memegang kekuasaan penuh sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pada waktu ini pula Soekarno mencabut Maklumat Pemerintah No. X, 3 November 1945 tentang kebebasan mendirikan partai politik. Dengan lahirnya demokrasi terpimpin, Indonesia mulai memasuki era dimulainya perpolitikan semi otoritarian, yaitu mulai dikecangkannya kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi politik. Hal ini diwujudkan dengan dikurangnya jumlah partai sebanyak 27 hasil pemilihan umum 1955, menjadi 10 partai politik pada tahun 1960, yaitu PNI, NU, PSII, Parkindo, Partai Katolik, PERTI, PKI, IPKI, MURBA, dan Partindo. Partai-partai lain dibubarkan (Herbert Feith dan Lance Castle, 1970: 82-83). Tindakan tersebut dilakukan Soekarno dengan pertimbangan bahwa partai jumlah partai yang

banyak akan mendorong terciptanya instabilitas politik seperti pada masa Demokrasi Parlementer. Masyumi yang merupakan partai 4 besar (lihat tabel IV a) dibubarkan dan PSI yang berperan besar pada masa perjuangan sesudah kemerdekaan juga dibubarkan. Kedua partai tersebut dituduh terlibat dalam berbagai konflik daerah terutama PRRI.

Dalam Demokrasi Terpimpin, PKI memegang peranan yang besar dalam perpolitikan. PKI dipakai oleh Soekarno untuk mengimbangi kekuatan militer yang mulai masuk dalam perpolitikan sipil. Militer memasuki perpolitikan sipil melalui Dewan Nasional yang dibentuk Soekarno pada 1958. Dalam kabinet Gotong-Royong di masa Demokrasi Terpimpin, 30% posisi menteri dipegang oleh militer. Pada era ini pula terjadi “pertarungan” kekuatan politik antara Soekarno, PKI dan militer terutama AD. Di masa ini partai politik dapat beroperasi sampai ke akar rumput atau *grass root*. Menghadapi hal tersebut, AD mendirikan organisasi kekarya-an Tri Karya yang terdiri atas MKGR, SOKSI dan KOSGORO. Organisasi-organisasi tersebut akhirnya disebut dengan Sekber Golkar. Soekarno yang merupakan pemimpin yang bersifat radikal, memalingkan orientasi politiknya ke Timur yaitu ke negara-negara komunis. Tindakan Soekarno tersebut mendapatkan tantangan yang kuat baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu dari kekuatan Barat. Situasi politik tersebut berakhir dengan jatuhnya Demokrasi Terpimpin pada 30 Oktober 1965 tanpa pernah dilakukan pemilihan umum. Berakhirnya kekuasaan Soekarno, berakhir pula kekuatan PKI.

C. PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI PANCASILA 1965 – 1998

Berakhirnya Demokrasi Terpimpin, melahirkan Demokrasi Pancasila yang diikuti dengan dibubarkannya PKI dan Partindo (Partai Indonesia) yang bersayap kiri serta larangan bagi semua hal yang berbau komunisme dan Parmusi lahir sebagai partai baru. Orde Baru melalui MPRS, mencabut kembali TAP MPRS No. III/1963 tentang penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di samping itu, Orde Baru juga mencabut TAP MPRS No. XXV/1969 tentang PKI. Masa ini dikenal pula dengan sebutan Orde Baru yang melahirkan harapan besar akan sistem politik yang demokratis dan stabil. Mulai saat itu, militer mulai mendominasi perpolitikan Orde Baru. Tujuan Orde Baru yang utama adalah kembali ke UUD 1945 secara konsekuen, kembali ke kehidupan yang demokratis dan memacu

pembangunan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, terutama untuk memacu pembangunan, diperlukan stabilitas politik yang dapat ditegakkan apabila terdapat kekuatan mayoritas.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah yang sudah didominasi militer dalam hal ini AD, mulai mengkonsolidasikan Sekber Golkar yang embrionya sudah tumbuh di masa Demokrasi Terpimpin untuk menjadi kekuatan politik yang mayoritas. Pemilu pertama Orde Baru pertama tahun 1971, Golkar keluar sebagai kekuatan mayoritas sebesar 62,82% dengan 236 kursi dari jumlah 360 kursi. Jumlah kursi di parlemen ditambah 100 kursi, yaitu 75 anggota ABRI dan 25 orang dari Utusan Golongan dan Daerah yang ditunjuk oleh presiden. Untuk memastikan bahwa dalam pemilu berikutnya Golkar akan tetap menjadi kekuatan mayoritas, pemerintah melakukan fusi partai pada tahun 1973 yaitu untuk partai-partai dengan orientasi Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai dengan orientasi nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar) yang merupakan organisasi sosial dan politik.

Selama 32 tahun Orde Baru telah menyelenggarakan pemilu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, di mana Golkar selalu keluar sebagai kekuatan mayoritas. Hal ini dapat dilihat pada tabel V di bawah ini. Sejak pemilu 1971, Golkar telah menjadi “partai politik” baru. Kekuatan mayoritas Golkar telah menciptakan stabilitas politik yang kokoh yang merupakan prasyarat utama untuk memacu pembangunan. Akan tetapi, dari perspektif demokrasi, Indonesia mulai menjadi negara otoriter dengan dominasi militer yang mirip dengan sistem politik di negara-negara Amerika Latin yang disebut sebagai Negara Birokratik Otoriter atau *Authoritarian Bureaucratic State*. Konsep ini dikemukakan oleh Guillermo O’ Donnell (Guillermo O’ Donnell, 1973) yang menjelaskan bahwa penopang Negara Birokratik Otoriter adalah kelompok teknokrat, sipil atau birokrasi dan militer yang sangat mendominasi dalam sistem politik Orde Baru.

Berbagai kebijakan politik dilakukan Orde Baru untuk dapat mempertahankan agar Golkar tetap menjadi kekuatan mayoritas. Seperti kebijakan monoloyalitas yang mengharuskan bahwa mereka yang menerima gaji dari pemerintah harus mendukung Golkar. Dalam perkembangannya, monoloyalitas juga ditujukan bukan hanya kepada pegawai negeri tetapi juga ke BUMN, industri-industri dan semua lembaga-lembaga swasta pun masuk dalam jaringan Golkar. Di samping itu, Soeharto menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Jelaslah bahwa Golkar berada di bawah kendali langsung

Presiden. Kebijakan lainnya adalah massa mengambang yang menetapkan bahwa partai politik hanya boleh beroperasi di Dati I dan II (provinsi dan kabupaten). Golkar, karena ia bukan partai politik dapat bergerak sampai ke Dati III yang kemudian ke desa di bawah UU No. 5 tahun 1974.

Berbagai kebijakan tersebut dirancang dengan tujuan untuk membendung gerak dari PPP dan PDI. Jangan dilupakan bahwa 75 % penduduk tinggal di daerah pedesaan. Pemilu Orde Baru juga merupakan pemilu yang manipulatif. Semua diatur oleh birokrasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Ketua KPU pusat dipegang oleh Menteri Dalam Negeri, di provinsi oleh Gubernur, di Kabupaten oleh Bupati atau Walikota, dan di desa oleh kepala desa yang harus menjadi kader Golkar di bawah UU No 5/1974. Dalam situasi seperti itu partisipasi politik masyarakat dan kebebasan mengemukakan pendapat sangat tidak dimungkinkan. Berbagai organisasi baik sosial maupun politik, *civil society*, media, organisasi perempuan dan sebagainya telah dikooptasi oleh negara. Kekuasaan Presiden atau eksekutif sangat kuat.

Kekuasaan legislatif yang semestinya berfungsi sebagai alat kontrol sudah dilemahkan karena komposisi keanggotaannya. Dalam DPR, Golkar selalu mayoritas, ditambah 75 orang ABRI, 25 orang Utusan Golongan yang ditunjuk oleh Presiden. Partai PPP dan PDI merupakan 2 (dua) partai politik yang tidak berdaya. Jumlah anggota DPR adalah 500 orang. Begitu pula anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berjumlah 1000 orang, terdiri dari anggota DPR yang 500 ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan, penambahan buat Golkar, PPP, PDI, dan ABRI yang semuanya ditunjuk oleh Presiden. Lembaga MPR inilah yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jelaslah bahwa *setting* tersebut bertujuan untuk memperkuat dan melanggengkan kedudukan Presiden sehingga tidaklah mengherankan bahwa Soeharto terus menerus terpilih menjadi Presiden sampai ia jatuh setelah 32 tahun berkuasa.

Begitu pula tata tertib legislatif telah membelenggu dan melemahkan lembaga tersebut untuk melakukan fungsi kontrolnya. Setiap usul untuk sebuah undang-undang, harus diusulkan oleh 20 orang atau lebih dan disetujui oleh lebih dari 2 (dua) fraksi. Fraksi dalam lembaga tersebut berjumlah 4 yaitu Fraksi Golkar, Fraksi ABRI, Fraksi PPP dan Fraksi PDI. Fraksi Golkar dan Fraksi ABRI jelas berdiri di belakang pemerintah. Itu sebabnya usulan atau inisiatif dari Fraksi PPP atau Fraksi PDI akan terganjal dengan mekanisme tersebut. Pengambilan suara atau voting, *one person one*

vote, ditiadakan. Pengambilan suara diputuskan melalui fraksi. Dampak dari mekanisme tersebut adalah bahwa perundang-undangan selama periode ini hampir semuanya berasal dari eksekutif atau pemerintah.

Meskipun banyak orang bertanya-tanya apakah Golkar partai politik atau bukan, Leo Suryadinata menyatakan,

“... sudah cukup jelas bahwa fungsi utama Golkar adalah sebagai sebuah mesin pemilu yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan militer. Ia juga bertindak untuk menyalurkan rancangan undang-undang yang disponsori pemerintah ke parlemen. Di samping itu, ia mewakili aspirasi budaya Muslim nominal dan nonmuslim dalam politik yang menentang Islam politik dan kaum fundamentalis Islam” (Leo Suryadinata, 1992: 67).

Jadi, Golkar di masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru, merupakan mesin politik dan mesin pemilu, organisasi yang menentang Islam politik dan Islam fundamentalis. Di bawah ini adalah tabel-tabel pemilu Orde Baru. Golkar merupakan alat untuk melegitimasi *status quo* Soeharto menutup aspirasi rakyat. Partisipasi rakyat tidak lagi bersifat spontan atau autonomus tetapi berubah menjadi partisipasi yang dikerahkan atau *mobilized participation*. Komunikasi politikpun menjadi bersifat satu arah yaitu *top down*. Saluran-saluran komunikasi politik dan partisipasi politik tidak lagi bersifat demokratis.

Tabel 1.5
Hasil Pemilu Orde Baru

Hasil Pemilu 1971

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	-
10.	Murba	48.126	0,08	-
		54.669.509		
Jumlah		54.669.509	100,00	360

Hasil Pemilu 1977

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
Jumlah		63.998.344	100,00	360	100,00	

Hasil Pemilu 1982

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
Jumlah		63.998.344	100,00	360	100,00	

Hasil Pemilu 1987

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1982)	Keterangan
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+ 8,82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27,78	- 11,81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+ 2,99
Jumlah		85.869.816	100,00	400		

Hasil Pemilu 1992

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1977)	Keterangan
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	- 0,72
Jumlah		75.126.306	100,00	364	100,00	

Hasil Pemilu 1997

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1982)	Keterangan
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+ 8,82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27,78	- 11,81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+ 2,99
Jumlah		85.869.816	100,00	400		

Sumber: kpu.go.id diakses tanggal 08 April 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil Golkar selalu mayoritas dan kedua partai lainnya, PPP dan PDI tidak berdaya menghadapi kekuatan Golkar yang

sudah menjadi kekuatan yang hegemonik. Perolehan suara yang tertinggi Golkar pada pemilu 1992, sebesar 73,16% , tetapi menurun pada pemilu 1997 yaitu sebesar 68,10%. Di sisi yang lain terdapat kenaikan perolehan suara PPP maupun PDI. Tahun tersebut merupakan tahun yang sangat kritis bagi Orde Baru dan tanggal 21 Mei 1998, Suharto mengundurkan diri maka berakhirilah 32 tahun pemerintahan otoriter dan Indonesia memasuki masa reformasi politik.

D. PARTAI POLITIK MASA DEMOKRASI PASCA ORDE BARU MASA REFORMASI 1998 - KINI

Mundurnya Soeharto membawa era baru bagi perpolitikan Indonesia yaitu Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI ke III dan di masa pemerintahannya telah terjadi liberalisasi politik. Partisipasi politik terbuka lebar-lebar sehingga dampaknya adalah lahirnya berbagai macam partai politik. Dalam Departemen Kehakiman terdaftar sebanyak 148 partai politik. Di samping itu, liberalisasi politik juga menyentuh hubungan pusat dan daerah yang dituangkan dalam UU 22/1999 dan 25/1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Habibie juga mengeluarkan kebijakan referendum untuk Timor-Timur.

1. Pemilu 1999

Menghadapi pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999, dibentuk P3KPU atau Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum atau disebut juga dengan Tim 11 yang akan memverifikasi partai politik peserta pemilu. Tanggal 4 Maret 1999 Tim 11 meloloskan 48 partai politik peserta pemilu 1999 dan dalam pemilihan 1999, Golkar menyatakan diri sebagai partai politik. Hasil pemilu tersebut dapat dilihat di Tabel VI dan semua partai peserta pemilu di Tabel IX.

Hasil pemilu tersebut sangat mencengangkan karena Golkar yang selalu ke luar sebagai kekuatan mayoritas, menjadi kekuatan kedua dengan 120 kursi atau 22,4% dan PDIP, semula adalah PDI, menjadi kekuatan pertama dengan jumlah kursi 153 atau 33,7%. Perlu diketahui bahwa PDIP yang pada masa Orde Baru hanya menjadi kekuatan ke-3, berhasil memperoleh suara terbesar meskipun tidak mayoritas. Hal ini diuntungkan secara psikologis, karena di bawah Orde Baru, Megawati telah mengalami “aniaya politik” dengan diobrak-abrikan markas PDI pada 27 Juli 1996. Di samping itu,

masyarakat telah menjadi jenuh dengan pemerintahan yang represif dan situasi krisis ekonomi.

Dalam pemilu 1999 lahir partai-partai baru yang sesungguhnya bersumber pada partai yang ada sebelumnya seperti PBB, Partai Bulan Bintang adalah “anak” dari partai Masyumi yang dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1958. PKB “bersumber” dari partai NU yang merupakan partai besar ke-3 pada pemilihan umum 1955. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan adalah partai Islam yang “tertutup”. Dalam pemilu 2004, PAN berubah menjadi partai terbuka artinya PAN dapat menerima keanggotaan nonmuslim. Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menjadi partai terbuka pada pemilu Tahun 2009. Di samping partai politik yang berorientasi Islam, lahir pula partai-partai yang berorientasi nonmuslim seperti Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) dan Partai Kresna. Juga lahir partai-partai politik yang berorientasi nasionalis, pecahan dari PNI atau PDI (masa Orde Baru) seperti PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaenis. Perolehan partai-partai tersebut sangat kecil. (lihat Tabel XI).

Hasil pemilu 1999, sebenarnya dapat membawa Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden melalui pemilihan MPR tetapi gagal karena strategi atau *move-move* politik dari Poros Tengah yang dipimpin oleh Amien Rais dari PAN. Semua partai politik kecuali PDIP mendukung Poros Tengah untuk mengusung Abdulrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden. Hal ini dapat terjadi karena Megawati Soekarnoputri yang sudah terlalu percaya diri akan perolehan suara PDIP sehingga PDIP lupa untuk melakukan lobi-lobi politik ke partai-partai politik lainnya. Pendapat lainnya adalah dikemukakannya isu bahwa Islam menolak perempuan menjadi pemimpin dalam hal ini presiden perempuan. Hasil dari interaksi dan lobi partai-partai politik di MPR akhirnya menentukan Gus Dur, dengan kekuatan yang hanya 12,6% (lihat tabel VI) menjadi Presiden ke IV dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Gus Dur hanya bertahan selama satu setengah tahun karena ia dikenakan *impeachment* atau hukuman dengan tuduhan terlibat dalam *Bruneigate* dan *Buloggate*. Di samping itu, Gus Dur sebagai seorang tokoh demokrat, ingin secepatnya menegakkan supremasi sipil. Jabatan Gus Dur digantikan oleh Megawati Sukarnoputri yang memegang jabatan Presiden ke V hingga 2004. Dalam pemilihan umum 2004 Megawati Soekarnoputri dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam pemilihan presiden langsung dengan 2 putaran dan pemilihan umum 2009

kembali dikalahkan oleh SBY melalui pemilihan presiden langsung 1 putaran.

Tabel 1.6
Hasil Pemilu 1999

Partai	Suara	Persentase	Kursi
PDIP	35.706.618	33,7	153
Golkar	23.742.112	22,4	120
PKB	13.336.963	12,6	51
PPP	11.330.387	10,7	58
PAN	7.528.936	7,1	34
PBB	2.050.039	1,9	13
PK	1.436.670	1,4	7

Sumber: kpu.go.id diakses pada 08 April 2011

Pemilu berikutnya yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, menempatkan Golkar di tempat pertama meskipun dengan suara di bawah pemilu 1999 (lihat tabel), yaitu 21,6 % dan PDIP menjadi yang kedua dengan suara yang sangat anjlok yaitu dari 33,7% di pemilu 1999 menjadi 18,5% di pemilu 2004. Hasil menunjukkan bahwa hampir semua partai menurun kecuali PKS (PK) dari 1,4 di 1999 menjadi 7,3% dan lahirnya Partai Demokrat yang berhasil meraih suara sebesar 7,5%. Ke 2 partai tersebut nampaknya merupakan penyebab turunnya perolehan suara partai-partai lainnya dalam pemilu 2004. PDIP mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 15,2%. Beberapa analisis mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri terlalu percaya akan kekuatannya di Jawa dan lupa menggarap kekuatan di luar Jawa sedangkan Golkar melalui strategi politik Jusuf Kalla, berhasil menggarap Indonesia bagian Timur yang disebut dengan jalur Irama Suka di samping daerah-daerah lain di luar Jawa. (lihat Tabel VII dan IX).

Tabel 1.7
Hasil Pemilu 2004

Partai	Suara	Persentase	Kursi
Golkar	24.480.757	21,6	127
PDIP	21.026.629	18,5	109
PKB	11.989.564	10,6	52
PPP	9.248.764	8,2	58
PD	8.455.225	7,5	56
PKS	8.325.020	7,3	45
PAN	7.303.324	6,4	43

Sumber: kpu.go.id diakses pada 08 April 2011

Menghadapi pemilihan presiden 2004 terjadi pengelompokan partai-partai di putaran ke II untuk mendukung para calon presiden dan wakilnya. Di putaran I terdapat 5 pasang calon dengan masing-masing pendukung partai yaitu

Tabel 1.8
Pilpres 2004 Putaran Pertama, 5 Juli 2004

Calon Presiden dan Wakil Presiden	Persentase Perolehan Suara	Partai Pendukung
Wiranto-Salahuddin Wahid	22,15%	Golkar
Megawati-Hasyim	26,61%	PDI-P
Amien-Siswono	14,66%	PAN
Yudhoyono-Kalla	33,57%	Partai Demokrat
Hamzah-Agum	3,01%	PPP

Sumber: kpu.go.id diakses pada 3 Juni 2011

Pilpres 2004
Putaran Kedua 20 September 2004

Calon Presiden dan Wakil	Megawati-Hasyim	Yudhoyono-Kalla
Partai Pendukung	Koalisi Kebangsaan Golkar PDI-P PPP	Koalisi Kerakyatan Partai Demokrat PKS PBB

Calon Presiden dan Wakil	Megawati-Hasyim	Yudhoyono-Kalla
	PDS PBR	PKPI PPDK PP PPDI PPP Reformasi PPNUI Partai Bhineka Tunggal Ika

Sumber: Tempointeraktif.com diakses pada 3 Juni 2011

Dalam putaran ke II terjadi 2 koalisi partai yang disebut Koalisi Kebangsaan yang mendukung Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz dan Koalisi Kerakyatan yang mendukung Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla. Pemilihan putaran ke 2 dimenangkan oleh SBY – JK dengan suara 60, 62%. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena suara pendukung Koalisi Kebangsaan yang didukung oleh Golkar yang memperoleh suara terbesar, banyak yang pindah mendukung Jusuf Kalla yang ada dalam Koalisi Kerakyatan. Jusuf Kalla mempunyai pengaruh yang besar di jalur Irama Suka. Di putaran pertama pun, suara SBY–JK yang terbesar, yaitu 33,5%. Sesudah terpilih, JK baru menjadi ketua Golkar.

2. Pemilu 2009

Pemilu 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009, menghasilkan kejutan baru karena Partai Demokrat dapat meraih suara yang tertinggi, yaitu sebesar 20,85%. Terdapat kenaikan suara yang signifikan dibandingkan dengan pemilu 2004 yaitu sebesar 7,5% menjadi 20,85% di pemilu 2009. Jadi, terdapat kenaikan suara sebesar 13,35%. Hasil pemilu ini menunjukkan terdapat penurunan suara baik dari partai-partai Islam maupun partai-partai yang berorientasi nasionalis (lihat tabel IX). PBB, partai yang gigih memperjuangkan Syariat Islam hanya mendapatkan 5 kursi dan tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke DPR. Begitu pula PKS yang di pemilu 2004 mendapat suara 7,3%, di pemilu 2009 hanya 7,88% Partai tersebut hanya mengalami kenaikan tidak sampai 1%. Pemilu 2009 juga melahirkan partai-partai baru yang antara lain 2 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Partai-partai tersebut adalah Gerindra dengan

perolehan suara sebesar 4,94%, 26 kursi dan Hanura dengan suara 3,77%, 17 kursi.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati mengapa terjadi penurunan suara dari partai-partai tersebut karena kemunculan partai Gerindra dan Hanura yang nasionalis telah menyedot suara partai Golkar dan PDIP. Masyarakat tampaknya juga kecewa terhadap PDIP yang berperan sebagai oposisi yang pura-pura. Di samping itu, bermunculannya partai-partai baru (lihat tabel X dan XI) telah memecah suara menjadi tersebar ke partai-partai baru tersebut. Kenaikan yang sangat besar terjadi pada partai Demokrat karena SBY adalah *incumbent* dengan kebijakan yang nampaknya memesona rakyat, yaitu antara lain BLT atau bantuan langsung tunai di samping itu, masyarakat masih terpesona dengan strategi pencitraan SBY. Tetapi pemilu 2009, menunjukkan bahwa partisipasi politik rakyat menurun dan mereka yang golput diperkirakan sebesar 20 juta orang.

Dalam pemilu presiden pun, yang diadakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 3 pasang calon (lihat tabel X), Megawati-Prabowo, SBY-Budiono dan JK-Wiranto, SBY-Budiono menang dengan suara 59,70%. Megawati-Prabowo, 20,60% dan JK-Wiranto 18,22%. Kemenangan SBY-Budiono membawa persoalan baru karena Golkar dengan perolehan suara terbesar ke 2 di legislatif tidak berada dalam kelompok pendukung SBY-Budiono. Pada waktu ini Abu Rizal Bakri adalah ketua Golkar. SBY merasa dia memerlukan kepastian bahwa DPR yang memang telah menjadi *legislative heavy* akan merupakan penghalang untuk kebijakan-kebijakan politiknya. Untuk menghadapi hal tersebut, setahun setelah pemerintahannya yang kedua, SBY membuat koalisi partai-partai yang di DPR yang disebut dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang merupakan forum gabungan partai koalisi. Setgab diharapkan untuk tetap mendukung kebijakan-kebijakan SBY tetapi dalam prakteknya Setgab tersebut tidak solid. PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura menolak masuk dalam Setgab. Tampaknya popularitas pemerintahan SBY mulai merosot. Hasil survei LSI (Lembaga Survey Indonesia) popularitas partai Demokrat juga merosot, yaitu pada Januari 2011 menunjukkan, PD 20,5%, PDIP 12,5%, Golkar 13,5%. Sedangkan survei pada Juni 2011 menunjukkan PD 15,5%, PDIP 14,5%, dan Golkar 17,9%. (survei dilakukan kepada responden 1200 orang di 33 propinsi).

Tabel 1.9
Hasil Pemilu 2009

Partai	Suara	Persentase	Kursi
PD	21.703.137	20,85	148
Golkar	15.037.757	14,45	107
PDIP	14.600.091	14,03	94
PKS	8.206.955	7,88	57
PAN	6.254.580	6,01	46
PPP	5.533.214	5,32	37
PKB	5.146.122	5,32	28
P. GERINDRA	4.646.406	4,94	26
P. HANURA	3.922.870	3,77	17

Sumber: kpu.go.id diakses pada 3 Juni 2011

Tabel 1.10
Pilpres 2009

Mega-Prabowo	SBY-Boediono	JK-Wiranto
Partai Pengusul	Partai Pengusul	Partai Pengusul
PDIP	PD	Golkar
PNI-M	PKS	Hanura
Partai Karya Perjuangan	PAN	
Gerindra	PPP	
Partai Buruh	PKB	
Partai Merdeka	PBB	
Partai Kedaulatan	PDS	
PPNUI	PKPB	
PSI	PBR	
	PPRN	
	PKPI	
	PDP	
	PPPI	
	Partai Republika	
	Partai Patriot	
	PNBKI	
	PMB	

Mega-Prabowo	SBY-Boediono	JK-Wiranto
	PPI Partai Pelopor PKDI PIS PIB Partai PDI	

Sumber: kpu.go.id diakses pada 3 Juni 2011

Tabel 1.11
Partai Politik dalam Pemilu Pasca Orde Baru/Reformasi

No	1999	K	2004	K	2009
1	PDIP	153	PNI Marhaenisme	1	Demokrat
2	Golkar	120	PBSD	0	Golkar
3	PPP	58	PBB	11	PDIP
4	PKB	51	Partai Merdeka	0	PKS
5	PAN	34	PPP	58	PAN
6	PBB	13	PDK	5	PPP
7	Partai Keadilan	7	PIB	0	PKB
8	PKP	4	PNBK	1	Gerindra
9	PNU	5	Partai Demokrat	57	Hanura
10	PDKB	5	PKP Indonesia	1	PBB
11	PBI	1	PPDI	1	PDS
12	PDI	2	Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia	0	PKNU
13	PP	1	PAN	52	PKPB
14	PDR	1	PKPB	2	PBR
15	PSII	1	PKB	52	PPRN
16	PNI Front Marhaenis	1	PKS	45	PKPI
17	PNI Massa Marhaen	1	PBR	13	PPDI
18	IPKI	1	PDIP	109	Barisan Nasional
19	PKU	1	Partai Damai Sejahtera	12	PDK
20	Masyumi	1	Partai Golkar	128	PNI Marhaenisme
21	PKD	1	Partai Patriot Pancasila	0	Perhuanagan Indonesia Baru
22	PNI Supeni	0	Partai Sarikat Indonesia	0	PNI
23	Krisna	0	Partai Persatuan Daerah	0	Partai Pelopor

No	1999	K	2004	K	2009
24	Partai KAMI	0	Partai Pelopor	2	Partai Patriot
25	PUI	0			Partai Demokrasi Pembaruan
26	PAY	0			Partai Indonesia Sejahtera
27	Partai Republik	0			Partai Karya Perjuangan
28	Partai MKGR	0			Partai Kasih Demokrasi Indonesia
29	PIB	0			Partai Kedaulatan
30	Partai Suni	0			Partai Matahari Bangsa
31	PCD	0			Partai Nasional Benteng Kerakyatan
32	PSII 1905	0			Partai Pemuda Indonesia
33	MAsyumi Baru	0			Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
34	PNBI	0			Partai Persatuan Daerah
35	PUDI	0			Partai Republik Nusantara
36	PBN	0			
37	PKM	0			Partai Aceh
38	PND	0			Partai Aceh Aman Sejahtera
39	PADI	0			Partai Bersatu Aceh
40	PRD	0			Partai Daulat Aceh
41	PPI	0			Partai Rakyat Aceh
42	PID	0			Partai Suara Independen Rakyat Aceh
43	Murba	0			
44	SPSI	0			
45	PUMI	0			

No	1999	K	2004	K	2009
46	PSP	0			
47	PARI	0			
48	PILAR	0			

Sumber: kpu.go.id diakses tanggal 08 April 2011

Tabel 1.11 menunjukkan bahwa setelah reformasi, partai politik bertumbuhan karena terdapatnya liberalisasi politik tetapi hal tersebut membawa masalah yang rumit dengan sistem politik kita yang bersifat presidensial. Secara teoritis, sistem dwi-partai lebih cocok untuk sistem presidensial tetapi bagi Indonesia yang bersifat plural, mengubah sistem multipartai dengan sistem dwi-partai dianggap tidak sesuai pula dengan aspirasi masyarakat. Untuk mengurangi jumlah partai yang demikian besar, pemerintah mulai memberlakukan apa yang disebut dengan mekanisme *threshold*.

Mekanisme tersebut dimulai pada tahun 2003 yang tertuang dalam UU No.12/2003 tentang Pemilu. UU tersebut mengatur tentang *electoral threshold* sebesar 3%. Partai politik yang memenuhi perolehan suara nasional sebesar 3% dapat mengikuti pemilu 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partai politik yang tidak memenuhi 3% tetapi mempunyai kursi di DPR hasil pemilu 2004, otomatis menjadi peserta pemilu 2009.

Perkembangan berikutnya menghadapi pemilu 2008, lahir UU No. 10/2008 tentang Pemilu yang menyatakan tidak *electoral threshold* (ET). Pasal 202 UU tersebut menetapkan berlaku 2,5% *parliamentary threshold* (PT). Bagi partai politik yang memenuhi hal tersebut dapat mengikuti pemilu 2014 setelah melalui verifikasi ulang. Untuk menghadapi pemilu selanjutnya kembali dilakukan revisi UU Pemilu. Beberapa partai mengusulkan besaran PT. Golkar dan PDIP yang merupakan partai besar, mengusulkan 5%, partai Demokrat 4% dan 3% usul dari PPP dan PKB.

Mekanisme *threshold* tersebut bertujuan untuk memperkecil jumlah partai politik agar stabilitas politik akan lebih mudah dicapai. Sistem multi partai tanpa melahirkan partai mayoritas sebesar 51% akan melahirkan kerumitan politis untuk menegakan stabilitas atau kemantapan pemerintahan. Hal tersebut, dapat kita lihat dalam perpolitikan yang dialami. Hasil pemilu 2009 (Tabel 1.9) yang diikuti oleh 43 parpol, telah melahirkan 9 parpol tanpa suara mayoritas di DPR atau legislatif. Untuk mengantisipasi akan

munculnya ketidakstabilan politik dan pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono membentuk koalisi di DPR untuk mendukung pemerintahannya. 6 parpol masuk dalam koalisi dan 3 parpol, yaitu PDIP, Gerindra berada di luar koalisi dan berperan sebagai “oposisi”. Koalisi dalam legislatif, tercermin pula dalam lembaga eksekutifnya 3 parpol di luar koalisi tidak mempunyai menteri dalam kabinet hasil pemilu 2009 yang lalu.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan dan uraikan mengenai sistem kepartaian di Indonesia.
- 2) Mengapa terdapat sistem kepartaian yang berbeda-beda dalam setiap sistem politik.
- 3) Mengapa terjadi liberalisasi politik.
- 4) Mengapa diberlakukan mekanisme *parliamentary threshold* (PT) dan *electoral threshold* (ET) dan UU Pemilu 2003 dan 2008.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Dari sejak kemerdekaan hingga masa kini, Indonesia menganut sistem multipartai dengan ciri masing-masing. Masa Demokrasi Parlementer, sistem kepartaian bersifat plural murni, masa Demokrasi Terpimpin partai dikurangi menjadi 10 parpol, masa Demokrasi Pancasila 9 parpol dan Golkar difusi menjadi 2 parpol dan Golkar dan masa pasca Orde Baru, partai dapat tumbuh sebebaskan-bebasnya.
- 2) Perbedaan sistem kepartaian merupakan strategi dari setiap sistem politik. Dalam sistem parlementer, perpolitikan yang bersifat demokratis di mana partisipasi politik terbuka seluas-luasnya, aspirasi rakyat dapat disalurkan ke berbagai partai yang bertumbuhan secara bebas. Tetapi bila stabilitas politik belum mantap, kehidupan partai politik yang tidak terkendali, dapat merupakan potensi konflik. Itu sebabnya dalam perpolitikan Indonesia terdapat perbedaan dalam kehidupan kepartaian.
- 3) Liberalisasi politik selalu lahir apabila pemerintahan yang non-demokratis runtuh. Dalam perpolitikan yang otoriter, partisipasi dibelenggu, berbagai organisasi sosial, politik dan ekonomi berada di bawah kendali negara. *Pressure group* dilarang dan *civil society*, LSM, semua tidak dapat berkembang karena negara mengendalikan mereka.

Ketika pemerintahan yang nondemokratis berakhir tuntutan akan kehidupan yang demokratis dan liberalisasi politik tak dapat dielakkan.

- 4) *Electoral Threshold* (ET) dan *Parliamentary Threshold* (PT) merupakan usaha pemerintah untuk memperkecil jumlah parpol agar dapat menciptakan perpolitikan yang lebih mendukung sistem politik presidensial.



RANGKUMAN

Dalam kegiatan belajar ini ada beberapa kunci yaitu, bahwa partai politik merupakan organisasi tempat aspirasi rakyat. Sistem multi partai mencerminkan terdapatnya beragam aliran atau ideologi dalam masyarakat yang disalurkan ke dalam partai politik. Partai politik selain sebagai wadah aspirasi rakyat, partai juga merupakan alat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Semakin besar dukungan rakyat atau konstituen, semakin besar pula kekuasaan yang diperoleh partai politik yang bersangkutan. Partai politik merupakan suatu keniscayaan bagi negara modern yang demokratis. Bagi Indonesia yang menganut sistem politik presidensial dengan sistem multipartai yang bebas, pasca Orde Baru, dirasakan kurang mendukung dalam jalannya pemerintahan. Itu sebabnya untuk mengatasi hal tersebut, dilahirkanlah UU Pemilu No. 12/2003 yang digunakan untuk pemilu 2004 yang mengatur tentang *electoral threshold* (ET) sebesar 3% dan UU Pemilu No. 10/2008 untuk pemilu 2009 yang mengatur *parliamentary threshold* (PT) sebesar 2,5%.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Partai politik Indonesia mulai lahir setelah dikeluarkannya
 - A. pernyataan politik dari PM Syahrir
 - B. pernyataan politik dari Presiden Soekano
 - C. pernyataan politik dari PM Moh. Natsir
 - D. Maklumat Wakil Presiden Moh. Hatta No. X Tanggal 3 November 1945

- 2) Mengapa sistem politik demokrasi dipimpin membatasi jumlah partai politik agar
 - A. dapat menciptakan stabilitas politik
 - B. supaya lebih demokratis

- C. supaya tidak dikatakan sebagai negara komunis
 D. supaya lebih mudah berkompetisi
- 3) Kekuatan legitimasi politik orde baru selain teknokrat dan militer adalah
 A. birokrasi dan Golkar
 B. angkatan bersenjata, ABRI
 C. lembaga legislatif DPR dan DPD
 D. lembaga MPR
- 4) Apa yang terjadi dengan lahirnya liberalisasi politik pada tahun 1998....
 A. partisipasi politik terbuka luas sehingga beragam partai politik lahir
 B. pemerintahan menjadi sangat represif
 C. pemilihan umum menjadi bersifat distrik
 D. partai politik dilarang berideologi
- 5) Mengapa pemerintah memberlakukan mekanisme ET sebesar 3% dalam menghadapi
 A. tuntutan dari masyarakat
 B. untuk mengurangi jumlah partai, agar lebih mendukung jalannya
 C. agar suara pemilih tidak terbuang
 D. untuk mendorong terbentuknya koalisi di DPR atau di kabinet

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Negara yang plural atau heterogen.
- 2) D. Organisasi politik yang bertujuan untuk meraih kekuasaan melalui pemilu.
- 3) A. Merupakan wadah dan penyalur aspirasi masing-masing kelompok.
- 4) B. Mempunyai kebebasan untuk tumbuh dan berkembang.
- 5) C. Terdapat di masyarakat yang plural dan heterogen.

Tes Formatif 2

- 1) B. Kedaerahan atau primordial.
- 2) B. Memperbaiki nasib rakyat dari kebodohan dan kemiskinan.
- 3) B. Merupakan titik tolak bangkitnya rasa kebangsaan menghadapi kolonialisme.
- 4) C. Semakin menguatnya gerakan akan kebebasan dan rasa nasionalisme.
- 5) C. Gerakan yang bersifat agama, sosialis, dan nasionalis.

Tes Formatif 3

- 1) D. Maklumat Wakil Presiden Moh. Hatta, No. X 3 November 1945.
- 2) A. Agar dapat menciptakan stabilitas politik.
- 3) A. Birokrasi dan Golkar.
- 4) A. Partisipasi politik terbuka luas sehingga beragam partai politik lahir.
- 5) B. Mengurangi jumlah partai agar dapat mendukung jalannya pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A dan G. Bingham Powell Jr. *Comparative Politics* (2nd ed.). Boston, Toronto: Little Brown and Company: 1978.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emmerson, Donald K. 1976. *Indonesia's Elite, Political Culture and Cultural Politics*. Ithaca, London: Cornell University Press.
- Feith, Herbert dan Castle. 1970. *Indonesia Political Thingking 1945-1965*. New York: Cornell University Press.
- Feith, Herbert dan Lance Castle. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Feith, Herbert. 1964. *The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia*. Cornell: Cornell University Press.
- Geertz, Clifford (eds). *Old Societies and New States, The Quest for Modernity in Asia and Africa*. 1965. London: The Free Press of Glencoe.
- Hague, Rod dan Martin Harrop. 2001. *Comparative Government and Politics, An Introduction*. New York: Palgrave.
- Kahin, George McTurnen. 1970. *Government and Politics of Asia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Pasang Surut*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Mayo, Henry B, *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Michels, Robert. 1966. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies Of Modern Democracy*. New York: The Free Press.

- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 – 1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Neumann, Sigmund. 1963. “Modern Political Parties” dalam *Comparative Politics: A Reader*, eds., Harry Eckstein dari David Apter. London: The Free Press of Glencoe.
- Noer, Deliar dan Akbarsyah. 2005. *KNIP, Komite Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Risalah,
- Noer, Deliar. 1987. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- O’Donnell, Guillermo. 1973. *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: California University Press,
- Pringgodigdo, A.K. 1967. *Sejarah Pergerakan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ratnam, K. J. 1967. *Communalism and the political process in Malaysia*. Singapore, Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Sargent, Lyman Tower (4th eds), *Contemporary Political Ideologies*, Illinois: The Dorsey Press,1978.
- Shiraishi, Takashi, 1997. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
- Soekarno. 2000. *Di Bawah Bendera Revolusi, jilid I*. Ware, Alan, *Political Parties And Party Systems*. New York: Oxford University Press.